



PENGANTAR AKUNTANSI

>>>>>

I Nyoman Wahyu Widian
Cici Widya Prasetyandari
Yenni Rohmatun
Aliah Pratiwi
Zainal Potton
Anna Sofia Atichasari
Ricky
Rini Ridhawati
Agnes Susana



PENGANTAR AKUNTANSI

**I Nyoman Wahyu Widianana
Cici Widya Prasetyandari
Yenni Rohmatun
Aliah Pratiwi
Zainal Potton
Anna Sofia Atichasari
Ricky
Rini Ridhawati
Agnes Susana**



GET PRESS INDONESIA

PENGANTAR AKUNTANSI

Penulis :

I Nyoman Wahyu Widiana
Cici Widya Prasetyandari
Yenni Rohmatun
Aliah Pratiwi
Zainal Potton
Anna Sofia Atichasari
Ricky
Rini Ridhawati
Agnes Susana

ISBN : 978-623-198-092-2

Editor : Diana Purnama Sari, M.E

Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.getpress.co.id

Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pengantar Akuntansi ini.

Buku ini membahas Pengenalan Akuntansi Keuangan, Persamaan Akuntansi, Akuntansi Kas, Akuntansi Aset Tetap, Akuntansi Aset Tidak Berwujud, Akuntansi Sumber Daya Alam, Akuntansi Liabilitas Lancar, Akuntansi Ekuitas, Akuntansi Korporasi.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENGENALAN AKUNTANSI KEUANGAN	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Definisi Akuntansi Keuangan.....	1
1.3 Peranan Akuntansi Keuangan	5
1.4 Profesi Akuntansi Keuangan.....	7
1.5 Perkembangan Akuntansi Keuangan	7
1.6 Organisasi Pembuat Standar Akuntansi Keuangan.....	8
DAFTAR PUSTAKA	10
BAB 2 PERSAMAAN AKUNTANSI.....	11
2.1 Pendahuluan	11
2.2 Pengertian Persamaan Akuntansi.....	11
2.3 Konsep Persamaan Akuntansi.....	12
2.4 Akun-akun dalam Persamaan Akuntansi.....	13
2.4.1 Aset.....	14
2.4.2 Kewajiban	16
2.4.3 Modal	18
2.5 Transaksi dalam Persamaan Akuntansi	19
DAFTAR PUSTAKA	23
BAB 3 AKUNTANSI KAS	25
3.1 Pegertian Akuntansi Kas	25
3.2 Fungsi Kas dan Jenis Kas	26
3.2.1 Fungsi Kas.....	26
3.2.2 Jenis Kas.....	26
3.3 Rekonsiliasi Bank	31
3.4 Pengendalian dan Penyajian Kas	33
3.4.1 Pengendalian Kas.....	33
3.4.2 Penyajian Kas	34

DAFTAR PUSTAKA.....	36
BAB 4 AKUTANSI ASET TETAP (BERWUJUD).....	37
4.1 Pengertian Dan Karakteristik Aktiva Tetap	
Berwujud	37
4.2 Harga Perolehan.....	38
4.3 Cara Perolehan Aktiva Tetap Berwujud.....	41
4.4 Penyusutan (Depresiasi)	42
4.5 Faktor-Faktor Penyebab Penyusutan	43
4.6 Faktor-Faktor Yang Menentukan Dalam	
Pembebanan Penyusutan	45
4.7 Pencatatan Dan Pelaporan Penyusutan	
(Depresiasi)	47
4.8 Macam-Macam Metode Depresiasi	48
4.8.1 Metode Aktivitas.....	49
4.8.2 Metode Garis Lurus (<i>Straight-Line Method</i>).....	51
4.8.3 Depresiasi Dengan Pembebanan Yang	
Menurun	52
DAFTAR PUSTAKA.....	57
BAB 5 AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD.....	59
5.1 Pengertian Akuntansi Aset Tidak Berwujud	59
5.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tak Berwujud...	62
5.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tak	
Berwujud	66
5.4 Pengungkapan Aset Takberwujud	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
BAB 6 AKUNTANSI SUMBER DAYA ALAM	73
6.1 Tinjauan Industri Pertambangan dan Perannya	
Bagi Perekonomian Global.....	73
6.2 Aset Sumber Daya Alam.....	75
6.3 Pencatatan Harga Perolehan Sumber Daya Alam ..	76
5.4 Deplesi Sumber Daya Alam.....	76
6.5 Perhitungan Deplesi Aset Sumber Daya Alam.....	77
6.6 Estimasi Variabel Untuk Alokasi Biaya Yang	
Telah Berubah.....	79

6.7 Perubahan dalam Masa Manfaat	80
6.8 Perubahan dalam Estimasi Unit Produksi	81
6.9 Akuisisi Aset Sumber Daya Alam	83
6.10 Nilai Aset Sumber Daya Alam Yang Tersisa	83
6.11 Akuntansi Tanah	85
6.12 Hak atas Tanah	85
6.13 Biaya Perolehan.....	86
6.14 Memperoleh Tanah dan Bangunan Bersama.....	87
DAFTAR PUSTAKA	90
BAB 7 AKUNTANSI LIABILITAS LANCAR.....	91
7.1 Pendahuluan	91
7.2 Utang Wesel (<i>Notes Payable</i>)	92
7.3 Utang Pajak (<i>Tax Payable</i>)	93
7.4 Pendapatan Diterima Dimuka (<i>Unearned Revenue</i>).....	93
7.5 Beban Akrua (<i>Accrued Expenses</i>) – Beban Gaji (<i>Salaries and Wages</i>).....	95
7.6 Liabilitas Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Saat Ini (<i>Current Maturities of Long-Term Debt</i>).....	95
7.7 Kumpulan Soal-soal Latihan	96
DAFTAR PUSTAKA	100
BAB 8 AKUNTANSI EKUITAS.....	101
8.1 Pendahuluan	101
8.2 Saham.....	102
8.2.1 Saham Biasa	103
8.2.2 Saham Preferen	104
8.2.3 Perubahan Nilai Nominal Saham	104
8.2.4 Menerbitkan Saham	106
8.3 Laba Ditahan	107
8.4 Dividen	109
8.5 Laporan Perubahan Ekuitas.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

BAB 9 AKUNTANSI KOPERASI	115
9.1 Pengertian Koperasi	115
9.2 Karakteristik Koperasi Indonesia	116
9.3 Prinsip-Prinsip Koperasi Di Indonesia.....	117
9.4 Perbedaan Koperasi Dengan Perseroan Terbatas.	118
9.5 Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi	119
9.6 Persamaan Akuntansi Koperasi.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	130
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Proses Akuntansi Keuangan.....	3
Gambar 2.1 : Rumus Persamaan Akuntansi	12
Gambar 2.2 : Rumus Persamaan Akuntansi dibiayai Oleh Modal	13
Gambar 2.3 : Rumus Persamaan Akuntansi dibiayai Oleh Hutang.....	13
Gambar 8.1 : Persamaan Akuntansi.....	101
Gambar 8.1 : Jurnal untuk Mencatat Penerbitan Saham.....	106
Gambar 8.3 : Jurnal untuk Mencatat Pembelian Saham dengan Premium.....	107
Gambar 8.2 : Jurnal pada saat Pengumuman Dividen.....	110
Gambar 8.3 : Jurnal pada saat pembayaran Dividen.....	110
Gambar 8.4 : Kenaikan dan Penurunan pada Ekuitas.....	111
Gambar 8.5 : Perhitungan Ekuitas.....	112
Gambar 9.1 : Hubungan Persamaan Akuntansi dengan Debit dan Kredit.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Saldo Normal Akun.....	19
Tabel 2.2 : Persamaan Akuntansi CV. LESTARI	22
Tabel 4.1 : Program Depresiasi Dengan Metode Garis Lurus.....	51
Tabel 4.2 : Program Depresiasi dengan Metode Jumlah Angka Tahun	53
Tabel 4.3 : Program Depresiasi dengan Metode Saldo yang Menurun.....	55
Tabel 4.4 : Program Depresiasi dengan Metode <i>Double Declining Balance</i>	56

BAB 1

Pengenalan Akuntansi Keuangan

Oleh I Nyoman Wahyu Widiana

1.1 Pendahuluan

Dalam pertumbuhan dunia ekonomi, peranan akuntansi sangat berarti ketika memutuskan suatu aktivitas pada organisasi untuk menghindarkan kerugian. Akuntansi menunjukkan data keuangan secara angka dan hitungan agar dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam pengetahuan akuntansi diketahui dua kata yang sering disebut dengan *accountancy* dan *accounting*, kemudian diterjemahkan dengan sebutan Akuntansi. *Accountancy* ialah sesuatu metodologi serta himpunan pengetahuan berkaitan sistem data dari satuan ekonomi. Kemudian *accounting* dikatakan adalah pengetahuan yang menyangkut proses penerapan pembukuan. Maka sebutan *accountancy* dapat dikatakan memiliki makna lebih luas secara bidang teori, proses pembukuan pelaksanaan, praktek, pengecekan dan evaluasi.

1.2 Definisi Akuntansi Keuangan

Akuntansi terdiri dari kata *account* yakni laporan, catatan, rekening. Tujuan akuntansi laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan merupakan proses pringkasan, penggolongan, pencatatan, serta pelaporan transaksi- transaksi dalam bentuk laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan baik internal yakni karyawan, owner serta manajemen serta eksternal yaitu

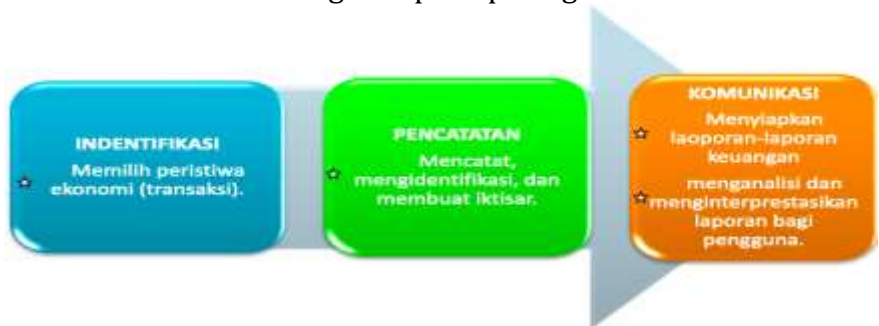
kreditor serta lembaga pemerintah. Masing- masing pengguna akan membutuhkan data yang berbeda. Akuntansi keuangan merupakan proses pencatatan segala kegiatan yang berhubungan dengan industri. Harahap (2002), akuntansi keuangan selaku seni pencatatan, melalui metode tertentu baik moneter, transaksi, serta kejadian peristiwa yang terjadi. Soemarso (2009: 5), akuntansi keuangan selaku proses pengidentifikasian, pengukur penilaian serta keputusan. Walter (2007: 4) akuntansi keuangan ialah suatu sistem informasi dalam suatu bisnis yang berkaitan dengan data keuangan yang akan menjadikannya acuan kepada pihak pengambil keputusan. Warren (2005: 10), akuntansi keuangan ialah sistem informasi berupa laporan kepada pihak terkait tentang bagaimana keadaan industri. Akuntansi keuangan merupakan perhitungan secara berkala yang berkaitan dengan bayaran (usaha) serta hasil(prestasi). Definisi akuntansi keuangan ialah:

- 1) Akuntansi selaku sistem data merupakan data ekonomi dari aktivitas (transaksi) organisasi maupun industri.
- 2) Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengidentifikasikan, pengukuran, serta pelaporan data ekonomi kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan.
- 3) Data ekonomi kuantitaif akuntansi keuangan bermanfaat dalam evaluasi serta pengambilan keputusan untuk pihak yang membutuhkan.

Akuntansi keuangan berguna bagi suatu organisasi untuk profit ataupun organisasi yang sifatnya non profit. Akuntansi ialah sesuatu proses mengelola , mencatat, meringkas, mengklasifikasikan serta menyajikan informasi, peristiwa dan transaksi dan keuangan untuk dipahami pihak terkait dalam pengambilan keputusan langkah selanjutnya. Akuntansi keuangan selaku sesuatu kegiatan data kuantitatif, berkaitan dengan keuangan. Data ini menjadi acuan ketika keputusan diambil. Akuntansi memiliki 3 komponen utama

ialah Input(masukan) yang berbentuk transaksi, peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Kemudian Proses(prosedur), meliputi pengidentifikasi transaksi hingga dengan penyajian informasi keuangan. Proses utama akuntansi merupakan pencatatan yang terdiri dari penjumlahan serta pemindahbukuan. Serta Output (keluaran) yang berbentuk data keuangan semacam laporan laba rugi, laporan pergantian ekuitas, pergantian posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Akuntansi keuangan ialah sesuatu seni mengidentifikasikan, mengumpulkan, mencatat mengklasifikasikan, transaksi dan peristiwa keuangan yang berguna untuk pihak terkait. Akuntansi keuangan merupakan sesuatu sistem data yang mengenali, mencatat, serta mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dalam organisasi. Akuntansi keuangan dikatakan pula sebagai sesuatu ilmu mengenai kerangka konseptual meliputi prinsip, standar, tata cara, serta metode, dan prosedur dalam laporan keuangan pada suatu usaha. Proses akuntansi keuangan seperti pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 : Proses Akuntansi Keuangan

1.2 Manfaat Akuntansi Keuangan

Pada dasarnya manfaat akuntansi keuangan ialah melakukan mengumpulkan, pencatatan dan melaporkan informasi posisi keuangan, kinerja, serta arus kas pada suatu usaha. Informasi ini bermanfaat sebagai pedoman mengenai

langkah apa yang akan diambil untuk pengambilan keputusan ekonomi. Manfaat akuntansi keuangan yakni :

- 1) Menyajikan informasi keuangan meliputi aktiva maupun pasiva perusahaan.
- 1) Menyajikan informasi perubahan sumber ekonomi (netto) perusahaan.
- 2) Menyajikan informasi keuangan perusahaan sehingga akan dapat mengestimasi potensi keuntungan perusahaan.
- 3) Menyajikan informasi lainnya dalam laporan keuangan guna membantu pemakai laporan tersebut.

Selain manfaat akuntansi keuangan penting pada suatu usaha, akan dapat berdampak pula bagi perkembangan perekonomian, yakni :

1) Acuan Informasi Keuangan

Akuntansi keuangan bermanfaat bagi pihak pengambilan keputusan, dalam internal dan eksternal. Informasi bermanfaat sebagai acuan dasar langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh suatu usaha tersebut.

2) Bahan Evaluasi Keuangan

Adanya informasi keuangan, perusahaan akan mengetahui apa saja yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Contohnya, setelah dilakukan pencatatan keuangan, ternyata keuangannya mengalami defisit karena terlalu boros membeli bahan produksi, maka perusahaan tersebut akan dapat mengevaluasi pengklasifikasian dalam membuat budgeting nantinya sehingga akan dapat lebih efisien.

3) Bukti Keuangan dan Kontrol

Ketika sudah ada pencatatan keuangan bermanfaat dalam mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menerka lagi berapa pengeluaran, karena sudah dapat dibuktikan dengan adanya laporan keuangan. Akuntansi keuangan juga dikatakan acuan alat kontrol dalam pengendalian

keuangan, sehingga pengalokasikan sumber daya lebih efisien.

4) Mengelola Keuangan

Pencatatan keuangan bermanfaat kepada semua pihak yang terkait dalam suatu bisnis, sehingga akan dapat memperhitungkan keperluan apa saja yang diperlukan setiap harinya sehingga pengeluaran akan lebih tepat sasaran.

1.3 Peranan Akuntansi Keuangan

Peranan Akuntansi keuangan diharapkan bisa memberikan data yang pas saat membagikan keputusan efisien, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi tepat demi kemajuan industri bisnisnya. Peranan akuntansi secara umum, yakni :

- 1) Digunakan dalam mengenali data yang berkaitan dengan manajemen.
- 2) Memiliki peran dalam menghitung laba dan rugi industri.
- 3) Dapat berkontribusi kepada pihak industri baik pihak intern ataupun ekstern.
- 4) Dapat mengatur dan mengawasi aktivitas- aktivitas industri.
- 5) Menjadikan suatu acuan pelaporan perusahaan

Jika dipelajari peranan akuntansi keuangan merupakan memberikan data yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan akuntansi keuangan yakni :

- 1) Menjadikan acuan dalam merencanakan kerja atau program selanjutnya.
- 2) Pengendalian, bersumber pada rencana serta pelaksanaan sistem akuntansi dapat dikontrol ataupun dinilai jalannya industri.

- 3) Pertanggungjawaban, setelah dilakukan pencatatan maka diperlukan evaluasi.

Pihak Ekstern merupakan pihak luar industri yakni :

- 1) Investor
Investor memerlukan data keuangan industri guna memperkirakan apakah akan menanamkan modal ataupun tidak. Investor akan menilai apakah perusahaan tersebut layak atau tidak menerima investasi karena akan berkaitan dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.
- 2) Pemerintah
Besarnya pajak wajib yang akan dibayarkan industri dan organisasi kepada pemerintah bersumber pada laporan keuangan industri.
- 3) Kreditur
Bila industri lagi terdesak serta memerlukan dana fresh, perusahaan bisa jadi hendak meminjam duit pada kreditor semacam meminjam duit di bank, berhutang benda pada supplier/ pemasok. Kreditur hendak membagikan dana bila industri mempunyai kondisi keuangan yang baik serta tidak hendak mempunyai kemampuan yang besar untuk merugi.
- 4) Pihak Lainnya
Sesungguhnya masih banyak pihak lain dari luar industri yang mungkin saja hendak memakai laporan/ data akuntansi sesuatu organisasi semacam para karyawan, serikat pekerja, auditor akuntan publik, polisi, pelajar/ mahasiswa, wartawan, serta banyak lagi yang lain.

1.4 Profesi Akuntansi Keuangan

Jabatan profesi akuntansi keuangan dikelompokkan pada bermacam bidang, yakni akuntansi publik serta akuntansi internal. Akuntan publik ialah akuntan yang berkaitan dengan kebutuhan publik yang jasanya bisa dipakai oleh siapa saja yang membutuhkan. Akuntan publik akan melakukan pengecekan laporan keuangan (*auditing*), perpajakan, serta konsultasi manajemen. Akuntan Internal ialah akuntan yang bernaung pada suatu industri tertentu, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan internal perusahaan tersebut. Akuntan internal bergerak di bidang kontroler, bendahara, kontroler, auditing, sistem informasi, pajak. Akuntan pemerintah (*governmental accountants*) ialah akuntan yang berkerja di suatu lembaga pemerintah.

1.5 Perkembangan Akuntansi Keuangan

Perkembangan akuntansi keuangan memiliki cerita yang cukup menarik, dimulai dengan adanya suatu catatan dengan pemakaian akun-akun pada tahun 1400-an peradaban kuno di Tiongkok, Babilonia, Yunani serta Mesir. Perkembangan akuntansi keuangan mulai berevolusi seiring dengan masa perekonomian yang pesat dengan adanya penciptaan pembuatan barang secara masal. Akuntansi keuangan selaku perlengkapan buat memproses informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan, mulai digunakan untuk para pembisnis saat itu. Prinsip akuntansi dapat mengikuti perkembangan jaman dan mengikuti tren bisnis serta tergantung kepada kebutuhan apa yang diperlukan oleh si pemakai data. Pergantian yang terjalin menampilkan kalau akuntansi keuangan selaku sesuatu sistem data ialah sesuatu sistem dinamis. Dengan demikian, manfaat data diharapkan akan kian bertambah. Jika dilihat pada pembangunan jangka

panjang di Indonesia, akan menunjukkan berbagai macam pergantian suasana perekonomian dan dunia usaha.

1.6 Organisasi Pembuat Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi adalah suatu kesepakatan, prosedur serta peraturan yang disusun melalui pengesahan lembaga formal. Standar ini meliputi mengenai metode pencatatan sumber ekonomi, kewajiban, modal, pemasukan, pembayaran serta pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan. Melalui standar ini dituliskan mengenai transaksi apa yang wajib dicatat, bagaimana proses pencatatan dan pengungkapan melalui laporan keuangan yang disajikan. Standar akuntansi terus-menerus berganti seiring dengan pertumbuhan era, dunia usaha, serta kemajuan teknologi. Terdapat empat organisasi yang mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi, yakni :

1) *Securities and Exchange Commissions*(SEC)

SEC berdiri tahun 1934 dengan mengatur penerbitan serta transaksi perdagangan sekuritas. Segala industri yang sahamnya dipunyai publik oleh SEC diwajibkan membuat laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kwartalan, serta data. SEC mengharuskan laporan keuangan industri publik diaudit oleh akuntan independen. SEC dibentuk dengan tujuan menghindari terbentuknya spekulasi transaksi perdagangan sekuritas. SEC berfokus terhadap pelaporan keuangan industri publik serta pengembangan standar akuntansi. SEC meningkatkan serta menstandarisasi data keuangan untuk pemegang saham. SEC menetapkan prinsip-prinsip akuntansi.

2) *American Institute of Certified Public Accountants*(AICPA)

AICPA merupakan suatu organisasi profesi akuntan publik di Amerika yang berdiri tahun 1887 serta menerbitkan

harian bulanan yakni, *Journal of Accountancy*. AICPA mempunyai kedudukan berarti dalam pengembangan serta pembuatan standar akuntansi, tercantum penyiapan penyelenggaraan tes sertifikasi serta pembelajaran berkepanjangan untuk para akuntan publik. AICPA melindungi integritas profesi akuntan publik, yakni pembuatan kode etik profesi serta program pengendalian kualitas.

3) *Financial Accounting Standards Board*(FASB)

FASB adalah suatu organisasi swasta yang mempunyai tanggung jawab dalam pembuatan standar akuntansi di Amerika saat itu. FASB berdiri tahun 1973, mengambil alih APB, karena sudah tidak ada kredibilitasnya. Anggota FASB terdiri dari beberapa akuntansi korporasi, audit, akademisi dan jasa keuangan.

4) *Governmental Accounting Standards Board*(GASB)

GASB berdiri tahun 1984 oleh FAF berfungsi menetapkan standar akuntansi keuangan pemerintah. Struktur organisasi GASB sama dengan FASB. GASB mempunyai dewan penasehat *Governmental Accounting Standards Advisory Council*.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri, "Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan", Edisi Pertama, Cetakan Ketiga.
Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Soemarso.2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Walter, 2007, Akuntansi, Penerbit Erlangga, Graha ilmu, Yogyakarta.
- Warren. 2005. Pengantar Akuntansi, Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.

BAB 2

PERSAMAAN AKUNTANSI

Oleh Cici Widya Prasetyandari

2.1 Pendahuluan

Akuntansi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan bagi setiap perusahaan. Laporan akuntansi diperlukan perusahaan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi selama satu periode akuntansi. Pencatatan akuntansi harus dilakukan secara benar sesuai dengan standar akuntansi.

Laporan akuntansi diperlukan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak internal memerlukan laporan akuntansi untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pihak eksternal memerlukan laporan akuntansi untuk mengukur kinerja perusahaan, menilai pajak, pertimbangan pemberian kredit, pertimbangan untuk investasi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, pihak perusahaan harus menyusun laporan akuntansi dengan benar. Sebelum menyusun laporan akuntansi, maka perusahaan harus memahami persamaan akuntansi.

2.2 Pengertian Persamaan Akuntansi

Bagi pemula yang akan belajar tentang akuntansi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami filosofi persamaan akuntansi (*the accounting equation*) dan munculnya akun-akun dalam persamaan akuntansi (Bahri, 2020;31). Persamaan akuntansi atau disebut juga persamaan dasar akuntansi merupakan suatu pedoman dalam penyusunan laporan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi

menggambarkan posisi harta yang dimiliki oleh perusahaan, hutang dan modal pada suatu perusahaan. Ketiga komponen ini merupakan dasar yang harus dipahami oleh setiap perusahaan. Perusahaan wajib mengelola harta dengan baik, dan mengetahui darimana asal harta-harta tersebut diperoleh.

2.3 Konsep Persamaan Akuntansi

Persamaan akuntansi menyatakan hubungan komponen-komponen dalam akuntansi yang disebut dengan akun, misalnya asset (harta), Liabilitas (kewajiban) dan ekuitas (modal) (Prasetyo dan Wulandari, 2020). Untuk memahami ketiga hubungan akun tersebut, maka dapat menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\boxed{\text{Aset}} = \boxed{\text{Kewajiban}} + \boxed{\text{Modal}}$$

Gambar 2.1 : Rumus Persamaan Akuntansi

(Sumber : Rahmi, 2021)

Gambar 2.1 menggambarkan bahwa jumlah harta perusahaan harus sama dengan jumlah kewajiban di tambah dengan modal. Harta menggambarkan keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kewajiban merupakan hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Modal merupakan kontribusi pemilik maupun investor untuk kegiatan operasional perusahaan. Konsep tersebut terjadi apabila suatu perusahaan menggunakan hutang dan modal untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya. Namun apabila perusahaan hanya menggunakan modal untuk membiayai kegiatan operasional, maka formulasinya adalah sebagai berikut;

$$\boxed{\text{Aset}} = \boxed{\text{Modal}}$$

Gambar 2.2 : Rumus Persamaan Akuntansi dibiayai Oleh Modal
(Sumber : Hariyani, 2016)

Gambar 2.2 menggambarkan bahwa perusahaan tidak memiliki hutang. Seluruh kegiatan operasional berasal dari modal pemilik maupun investor. Apabila perusahaan membiayai seluruh kegiatan operasionalnya menggunakan hutang, maka formulasinya dapat dilihat pada tabel 2.3.

$$\boxed{\text{Aset}} = \boxed{\text{Kewajiban}}$$

Gambar 2.3 : Rumus Persamaan Akuntansi dibiayai Oleh Hutang
(Sumber : diolah oleh penulis, 2022)

Gambar 2.3 menjelaskan bahwa perusahaan membiayai seluruh kegiatan operasionalnya dengan menggunakan hutang. Kondisi ini tidak baik bagi perusahaan. Hutang yang terlalu besar mengakibatkan terjadinya risiko gagal bayar. Kondisi keuangan yang buruk tentunya akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan.

2.4 Akun-akun dalam Persamaan Akuntansi

Akun adalah tempat untuk mencatat setiap perubahan transaksi berupa kenaikan atau penurunan setiap pos laporan keuangan secara terpisah dan dapat menunjukkan saldo pos tersebut (Fauziah, 2017). Akun merupakan pos-pos yang digunakan dalam mencatat transaksi keuangan. Akun dalam

Persamaan dasar akuntansi berkaitan dengan Aset, kewajiban dan modal.

2.4.1 Aset

Aset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan maupun pemerintah yang dapat dinilai secara finansial (Wahyuni & Khoirudin, 2020). Aset atau biasa disebut aktiva merupakan harta perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional. Aktiva dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang perputaran dan masa manfaatnya dapat digunakan kurang dari satu tahun. Aktiva lancar terdiri dari;

1. Kas

Kas adalah uang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang ada di bank maupun secara tunai dengan tujuan untuk memenuhi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tanpa adanya kas, maka perusahaan tidak akan dapat berjalan dan mengalami masalah keuangan yang menyebabkan kebangkrutan.

2. Piutang Usaha

Piutang usaha atau Piutang dagang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat penjualan barang/jasa secara Kredit. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan perusahaan kepada konsumen.

3. Persediaan

Akun persediaan hanya terdapat di perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa tidak memiliki akun persediaan karena perusahaan tersebut tidak memperjual belikan barang. Persediaan adalah barang yang tersedia digudang maupun ditoko dengan tujuan untuk dijual kepada para konsumen. Misalnya; sebuah Dealer Mobil memiliki sebuah stok mobil sebanyak 5 unit dengan total harga sebesar Rp 750.000.000,00. Maka nilai

persediaan perusahaan adalah Rp 750.000.000,00. Namun, Apabila perusahaan memiliki 5 mobil tetapi hanya 4 yang akan dijual dan 1 digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Maka, yang dicatat dalam akun persediaan adalah nilai dari 4 mobil tersebut.

4. Beban dibayar dimuka

Beban merupakan pengeluaran perusahaan yang dapat mengurangi laba. Beban dibayar dimuka diakui sebagai aset karena perusahaan membayar beban sekaligus untuk beberapa periode yang akan datang. Masa manfaat dari beban tersebut belum dirasakan, beban ini juga dianggap sebagai uang muka. Sehingga, akun tersebut tergolong dalam aktiva lancar. Contohnya adalah; sewa dibayar dimuka, asuransi dibayar dimuka, bunga dibayar dimuka dan lain sebagainya.

5. Perlengkapan Kantor

Perlengkapan merupakan barang yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Barang tersebut biasanya memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun. Contohnya perlengkapan kantor adalah kertas, pena, pensil, penghapus, staples, penggaris, tinta printer, penjepit kertas, map dan lain-lain.

Aktiva tetap adalah harta perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun. Aktiva tetap terdiri dari;

1. Tanah

Tanah merupakan harta yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila perusahaan memiliki tanah yang berasal dari pemilik, maka tanah tersebut dicatat berdasarkan harga pasar tanah saat itu. Namun, apabila tanah diperoleh dari membeli. Maka pencatatan akun tanah berdasarkan harga dan biaya-biaya yang diperoleh sampai dengan tanah tersebut siap digunakan. Contoh: Perusahaan A membeli sebuah tanah dengan harga Rp 150.000.000,00. Pajak jual

beli yang harus dibayar oleh perusahaan atas tanah tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,00. Biaya lain yang dikeluarkan adalah biaya pengurusan sertifikat dan notaris sebesar Rp 2.500.000,00. Berdasarkan contoh soal tersebut maka biaya perolehan tanah adalah sebesar Rp 155.200.000,00.

2. Bangunan

Bangunan merupakan sebuah gedung yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Bangunan yang dicatat disini merupakan gedung yang dimiliki oleh perusahaan, bukan merupakan sewa. Bangunan dapat berupa kantor, pabrik, toko dan lain-lain.

3. Kendaraan

Kendaraan adalah alat transportasi yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kendaraan berupa mobil, truk, sepeda dan alat transportasi lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

4. Peralatan

Peralatan adalah alat-alat yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Alat ini pada umumnya memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Peralatan dapat berupa; mesin, komputer, laptop, printer, handphone, meja, kursi, mesin absen, lemari dan lain sebagainya.

2.4.2 Kewajiban

Kewajiban atau sering disebut liabilitas merupakan hutang yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan nilai ekonomi (Ervina, et. Al, 2022). Liabilitas timbul karena ada kejadian dari masa lalu yang pembayarannya belum diselesaikan. Misalnya seperti pembelian barang dagangan secara kredit dan beban-beban yang belum dibayarkan. Pembukuan tetap dilakukan pada akhir periode meskipun ada beberapa tanggungan yang belum terselesaikan. Kewajiban-kewajiban tersebut nantinya akan

dibayarkan pada periode-periode selanjutnya. Adapun jenis-jenis kewajiban adalah sebagai berikut;

1. Utang Usaha

Utang usaha timbul karena pembelian barang atau kebutuhan perusahaan yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Jangka waktu utang usaha relatif pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Utang Usaha dikategorikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

2. Utang Wesel

Utang wesel merupakan utang yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menyertakan surat perjanjian pembayaran utang. Jangka waktu utang wesel sama halnya dengan utang usaha, yaitu kurang dari 1 tahun.

3. Utang Gaji

Utang gaji merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar karyawan karena telah melakukan pekerjaannya. Utang gaji harus segera dibayarkan, oleh sebab itu utang ini termasuk kedalam kewajiban jangka pendek.

4. Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena adanya bunga yang belum dibayarkan. Bunga dapat berasal dari transaksi utang bank, utang wesel dan lain sebagainya. Utang ini merupakan kategori utang jangka pendek.

5. Utang Sewa

Utang sewa timbul karena perusahaan belum membayar uang sewa. Kewajiban ini termasuk kedalam kewajiban jangka pendek. Maka, perusahaan harus segera membayar kewajibannya kepada pihak lain.

6. Utang Pajak

Setiap perusahaan wajib membayar pajak. Baik pajak atas laba yang diperoleh maupun pajak atas aset tetap yang dimiliki. Perusahaan yang telah menerima tagihan pajak namun belum menyelesaikan kewajibannya, maka harus

mencatatnya sebagai utang pajak. Adanya utang pajak berasal dari jumlah nominal pajak yang dibayarkan, denda dan biaya administrasi perpajakan.

7. Utang Bank

Apabila sebuah perusahaan melakukan pinjaman kepada bank, maka perusahaan akan mencatat sebagai utang bank. Jangka waktu utang bank berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pihak perbankan. Utang bank yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun, dikategorikan sebagai kewajiban jangka pendek. Sedangkan utang bank yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun, dikategorikan sebagai utang jangka panjang.

8. Utang Obligasi

Utang obligasi merupakan hutang perusahaan dengan cara menerbitkan surat obligasi. Perusahaan yang membutuhkan dana besar dapat menerbitkan suatu obligasi untuk di perjual belikan kepada masyarakat. Surat obligasi ini memiliki nominal dan tanggal jatuh tempo. Pada umumnya obligasi memiliki jangka waktu yang lama, yaitu 5-10 tahun. Oleh karena itu, obligasi termasuk kedalam kewajiban jangka panjang.

2.4.3 Modal

Modal atau disebut sebagai ekuitas adalah penyertaan pemilik perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Modal biasanya berasal dari seseorang yang menjadi pemilik sebuah perusahaan. Apabila perusahaan dimiliki lebih dari satu orang, maka modal diperoleh dari setoran beberapa orang yang nantinya akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pemilik disebut sebagai investor.

Selain akun Aset, Kewajiban dan modal, ada beberapa akun yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi, diantaranya adalah pendapatan dan modal. Pendapatan

merupakan akun yang digunakan untuk mencatat seberapa banyak produk/jasa perusahaan terjual kepada konsumen. Sedangkan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya; beban gaji, beban listrik dan air, beban iklan, beban sewa, beban asuransi, dan beban-beban lainnya.

2.5 Transaksi dalam Persamaan Akuntansi

Sebelum membahas mengenai transaksi-transaksi akuntansi. Maka anda perlu memahami konsep debit dan kredit yang terdapat dalam akuntansi. Debit berada disebelah kiri neraca dan kredit berada di posisi sebelah kanan neraca. Konsep ini merupakan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Berikut merupakan konsep dasar debit dan kredit dalam penyusunan laporan keuangan;

Tabel 2.1 : Saldo Normal Akun

Nama Akun	Bertambah	Berkurang	Saldo Normal
Aktiva	Debit	Kredit	Debit
Kewajiban	Kredit	Debit	Kredit
Modal	Kredit	Debit	Kredit
Pendapatan	Kredit	Debit	Kredit
Beban	Debit	Kredit	Debit

Sumber: data diolah penulis, 2022

Dalam praktiknya, sebelum mencatat kedalam laporan akuntansi, setiap transaksi harus memiliki bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti fisik adanya suatu transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan (Fauziah, 2017). Bukti transaksi dapat berupa nota, kuitansi, cek, faktur, dan lain-lain.

Berikut merupakan contoh-contoh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi:

1. CV. Mulya merupakan perusahaan milik Ny. Ana. Pada awal periode Ny. Ana menyetorkan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00. Uang tersebut telah digunakan untuk membeli perlengkapan sebesar Rp 1.000.000,00. Maka, persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut;

$$\begin{array}{llll} \text{Kas} & & + \text{Perlengkapan} & = & \text{Modal} \\ \text{Rp 19.000.000} & + & \text{Rp 1.000.000} & = & \text{Rp 20.000.000} \end{array}$$

Uang tunai yang di setorkan Ny. Ana akan dicatat sebagai penambahan akun kas dan penambahan modal perusahaan. Kas yang dibelanjakan untuk perlengkapan akan mengalami penurunan. Sehingga pada sisi aktiva nilai Kas Rp 19.000.000,00 dan Perlengkapan Rp 1.000.000,00.

2. Tuan Tono sebagai pemilik PT. Tayo telah menginvestasikan uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00. Sebagai tambahan modal PT. Tayo meminjam uang ke bank sebesar Rp10.000.000,00. Maka persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut;

$$\begin{array}{llll} \text{Kas} & & = \text{Utang Bank} & + & \text{Modal} \\ \text{Rp 25.000.000} & = & \text{Rp 10.000.000} & + & \text{Rp 15.000.000} \end{array}$$

Uang tunai yang di setorkan Tuan Tono akan dicatat sebagai penambahan akun kas dan penambahan modal perusahaan. Sedangkan uang tunai yang diperoleh dari pinjaman di catat pada akun utang bank dan kas. Utang bank termasuk ke dalam Liabilitas. Artinya, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya di kemudian hari.

3. Nona Rara mendirikan sebuah usaha dengan nama "Rara Salon". Untuk membiayai operasional perusahaan, Rara Salon meminjam uang di bank sebesar Rp 10.000.000,00. Uang tersebut telah dibelanjakan sebesar Rp 5.000.000,00 untuk membeli peralatan. Maka persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut;

$$\begin{array}{lll} \text{Kas} & + \text{Peralatan} & = \text{Utang Bank} \\ \text{Rp 5.000.000} & + \text{Rp 5.000.000} & = \text{Rp 10.000.000} \end{array}$$

Utang bank termasuk ke dalam liabilitas, artinya perusahaan harus melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan bank. Utang bank dicatat sebagai penambahan liabilitas. Uang tunai yang diperoleh dari bank dicatat sebagai penambahan akun kas. Sedangkan pembelian peralatan akan mengurangi jumlah kas perusahaan.

4. Pada Tanggal 1 Desember 2022 Riana mendirikan sebuah perusahaan dengan nama "CV. LESTARI". Awal pendirian, Riana menyetorkan modal sebesar Rp 8.000.000,00. Modal tersebut dibelanjakan untuk menyewa ruko sebesar Rp 4.000.000,00 selama satu tahun. Selain itu, CV. LESTARI juga membeli peralatan kantor sebesar Rp 7.000.000 secara kredit. Maka persamaan akuntansinya;

$$\begin{array}{l} \text{Kas} + \text{Sewa dibayar dimuka} + \text{Peralatan Kantor} = \text{Utang Bank} + \text{Modal} \\ \text{Rp 4.000.000} + \text{Rp 4.000.000} + \text{Rp 7.000.000} = \text{Rp 7.000.000} + \text{Rp 8.000.000} \end{array}$$

Untuk lebih memahami persamaan akuntansi di atas, lihat Tabel 2.2.

Tabel 2.2 : Persamaan Akuntansi CV. LESTARI

DEBIT		KREDIT	
Aktiva		Kewajiban	
Kas	4.000.000	Utang Usaha	7.000.000
Sewa Dibayar dimuka	4.000.000	Ekuitas	
Peralatan	7.000.000	Modal	8.000.000
Total Aktiva	15.000.000	Total K + E	15.000.000

Sumber: data diolah penulis, 2022

Modal yang disetorkan oleh pemilik akan dicatat sebagai penambahan akun kas dan modal sebesar Rp 8.000.000,00. Karena kas telah dibayarkan untuk membayar sewa sekaligus selama 1 tahun yang akan datang. Maka, dicatat sebagai pengurangan kas dan penambahan akun sewa dibayar dimuka sebesar Rp 4.000.000. Adapun transaksi pembelian peralatan dicatat sebagai penambahan akun peralatan kantor dan penambahan akun utang usaha sebesar Rp 7.000.000. Utang usaha timbul karena perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit untuk kegiatan operasional perusahaan. Adanya utang usaha dari transaksi tersebut, pada periode selanjutnya perusahaan harus melunasi seluruh kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syaiful. 2020. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. Edisi 3. Yogyakarta; CV. Andi Offset
- Ervina, Nelly et. al. 2022. *Teori Akuntansi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Fauziah, Ifat. 2017. *Buku Dasar-Dasar Akuntansi Untuk Orang Awam dan Pemula*. Pamulang; Ilmu Media Publishing.
- Hariyani, Diah Santi. 2016. *Pengantar Akuntansi I (Teori dan Praktik)*. Cetakan Pertama. Malang; Aditya Media Publishing.
- Prasetyo, Margo Saptowinarko dan Wulandari, Endang. 2020. *Pengantar Akuntansi*. Cetakan 1. Yogyakarta; Penebar Media Pustaka.
- Rahmi, Siti. 2021. *Pengantar Akuntansi I*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Wahyuni, Sri dan Khoirudin, Rifki. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar: CV. Nas Media Pustaka.

BAB 3

AKUNTANSI KAS

Oleh Yenni Rohmatun

3.1 Pengertian Akuntansi Kas

Thomas Sumarsan (2013:1) kas merupakan aset lancar paling likuid, yang berarti dapat digunakan secara langsung untuk keperluan operasional perusahaan.

Kas merupakan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan baik tunai maupun bukan atau berada di bank yang dapat digunakan setiap saat untuk kegiatan operasional perusahaan. (V.Wiratna Sujarweni, 2020)

Secara umum kas dapat diartikan sebagai komponen paling penting dalam laporan keuangan yang dimiliki perusahaan sebagai alat dalam mengoperasikan operasional perusahaan sehari-hari.

Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dapat segera dijadikan kas dalam jumlah tanpa menghadapi perubahan nilai yang berarti. (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.2, no date*)

PSAK No.2, Paragraf 6 menjelaskan setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Contoh setara kas seperti *treasury bills, money market* dan surat berharga dengan syarat setiap saat dapat ditukar dengan kas serta tanggal jatuh temponya singkat.

Baik kas dan setara kas merupakan asset milik perusahaan yang masuk pada aktiva lancar, yang terus menerus berubah dalam setiap akhir periode akuntansi.

Contoh kas dalam akuntansi :

- a. Pos perkiraan yang dapat digolongkan sebagai kas meliputi:
 1. Kas kecil
 2. Nota yang belum di reimbursment
 3. Saldo rekening giro dibank
- b. Pos perkiraan yang tidak dapat digolongkan sebagai kas meliputi:
 1. Deposito berjangka yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan
 2. Dana yang disishkan untuk tujuan lain
 3. Cek kosong dan cek mundur

3.2 Fungsi Kas dan Jenis Kas

3.2.1 Fungsi Kas

Fungsi kas dalam perusahaan meliputi:

1. Kas untuk bertransaksi dalam operasional kantor
2. Kas untuk berspekulasi dalam menginvestasikan dananya untuk mendapatkan keuntungan
3. Kas untuk berjaga- jaga dalam mengantisipasi keluar masuknya dana yang sulit diperhitungkan

Secara umum fungsi kas pada perusahaan merupakan biaya aktivitas perusahaan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan kantor sehingga kita mampu mengendalikan aliran kas tersebut.

3.2.2 Jenis Kas

Terdapat 2 jenis kas yang umum diketahui, seperti :

1. Kas Besar (*Cash at Bank*)

Kas Besar adalah Dana yang disiapkan oleh perusahaan untuk pengeluaran dalam jumlah besar serta memiliki jangka yang relatif lama.

Kas besar biasanya dikeluarkan pada saat terjadinya pembelian kendaraan, mesin, tanah, atau gedung secara tunai. Kas besar juga biasanya harus menggunakan cek, transfer antar bank, maupun giro, untuk meminimalisir resiko yang dihadapi.

Seperti contoh pada kasus dibawah ini:

Pada tanggal 01 Jan 2022 Tuan Daffa membeli sebuah kendaraan foruner untuk digunakan perjalanan dinasnya sebesar Rp. 400.000.000 dibayar secara tunai.

Maka Jurnal :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01 Jan 2022	Kendaraan	Rp 400.000.000	
	Kas		Rp 400.000.000

2. Kas Kecil (*Petty Cash*)

Menurut Dwi Martini (2016:184), bahwa bahwa kas kecil merupakan keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil, entitas tidak mungkin melakukannya dengan menggunakan cek karena tidak efisien.

Secara umum kas kecil merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam jumlah relatif kecil dan secara tunai, seperti penggunaan kas kecil dalam pembelian alat tulis kantor, materai, kebutuhan *pantry*, kebutuhan kebersihan kantor, dll.

Kas kecil pada perusahaan dipegang oleh salah satu karyawan yang ditugaskan menjadi administrasi keuangan, yang mana kas kecil tersebut maksimal sebesar Rp 5.000.000, jika dalam pertengahan bulan kas tersebut kehabisan maka karyawan tersbut bisa mengajukan kembali untuk mengisi kas kecilnya. Dengan syarat melampirkan bukti permohonan pengajuan dana dan bukti penggunaan kas kecilnya.

Kas kecil memiliki 2 sistem pencatatan akuntansi:

1) Sistem Imprest (dana tetap)

Sistem imprest merupakan sistem yang kas kecilnya tidak mengalami pengurangan (tetap semula) selama periode berjalan, hanya bukti pendukung transaksi yang disimpan dan dibubukan. Dan langsung diisi kembali setelah adanya pengeluaran, maka saldo kas kecil tetap utuh.

Contoh:

Pada tanggal 01 Jan 2022 Ny. Diffa mengajukan permohonan kas kecil (petty cash) untuk kebutuhan kantor sebesar Rp 5.000.000

Maka Jurnal:

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
01 Jan 2022	Kas Kecil	Rp 5.000.000	
	Kas		Rp 5.000.000

Pada saat Ny. Diffa mengeluarkan uang kas kecil untuk pembelian:

05 Jan 2022 Pembelian perlengkapan kantor (ATK)	Rp 450.000
08 Jan 2022 Membayar tagihan telepon dan air PDAM	Rp 250.000
10 Jan 2022 Membeli Bensin untuk dinas kantor	Rp 150.000
15 Jan 2022 Membayar tagihan listrik sebesar	<u>Rp 540.000 +</u>
Jumlah	Rp 1.590.000

Maka jurnalnya :

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
15 Jan 2022	Perlengkapan	Rp 450.000	
	Beban Tlp & PDAM	Rp 250.000	
	Beban Bensin	Rp 150.000	
	Beban Listrik	Rp 540.000	
	Kas Kecil		Rp 1.390.000

Dan jika pencatatan pada buku besar pada akun kas kecil dan kas besar periode bulan januari, dengan sebagai berikut:

Akun : Kas Kecil

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01 Jan	Saldo Kas Kecil	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000

Pada tabel tersebut menjelaskan kas kecil terjadi pengisian kembali sejumlah uang yang dikeluarkan oleh admin sehingga saldo kas kecil tidak mengalami pengurangan.

Akun : Kas

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01 Jan	Saldo Awal			Rp 50.000.000
15 Jan 2022	Kas Kecil		Rp 5.000.000	Rp 45.000.000
	Perlengkapan		Rp 450.000	Rp 44.550.000
	Beban Tlp & PDAM		Rp 250.000	Rp 44.300.000
	Beban Bensin		Rp 150.000	Rp 44.150.000
	Beban Listrik		Rp 540.000	Rp 43.610.000

2) Sistem Fluctuating

Sistem fluctuating adalah pembukuan kas kecil dimana rekening kas kecil jumlah akan selalu berubah-ubah (sesuai dengan kebutuhan). (V.Wiratna Sujarweni, 2020)

Secara umum sistem ini jurnal yang banyak perusahaan menggunakannya, karena lebih mudah dipahami.

Contoh kas kecil dengan sistem fluctuating:

Ket	Tanggal	Transaksi	Debet	Kredit
Pengadaan Kas kecil	01 Jan	Kas Kecil Kas	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
Pemakaian kas kecil	05 Jan	Perlengkapan Kas Kecil	Rp 450.000	Rp 450.000
	08 Jan	Beban Tlp & PDAM	Rp 250.000	Rp 250.000
	10 Jan	Kas Kecil Beban Bensin	Rp 150.000	Rp 150.000
	15 Jan	Kas Kecil Beban Listrik Kas Kecil	Rp 540.000	Rp 540.000
Pengisian kembali kas kecil	01 Jan	Kas Kecil Kas	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000

(Sumber : Rudianto (2009:201))

Berdasarkan jurnal diatas pada saat pengeluaran kas kecil akan mempengaruhi saldo kas kecil berkurang dengan cara mendebet dan mengkredit kas kecil.

3.3 Rekonsiliasi Bank

Menurut Wibowo dan Abu Bakar Arif (2000:118) Rekonsiliasi bank suatu laporan yang berisi saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank disertai dengan penyebab perbedaan keduanya.

Menurut Munandar (2006:40) Rekonsiliasi bank adalah kewajiban yang dilakukan perusahaan dalam mencari sebab-sebab ketidaksesuaian antara saldo simpanan menurut laporan catatan bank dengan saldo yang dimiliki perusahaan.

Secara umum rekonsiliasi bank merupakan penyamaan saldo antara saldo kas perusahaan dan rekening koran dari bank agar sinkronisasi data keuangan kas.

Tujuan dari adanya rekonsiliasi bank untuk memeriksa dan mengawasi saldo atau aliran kas sesuai dengan tanggal yang pemakaiannya serta memeriksa apabila muncul saldo kas dan bank dalam valuta asing, yang mana harus dikonversikan terlebih dahulu kedalam rupiah terhadap kurs (agar tidak ada selisih).

Terdapat beberapa penyebab terjadinya perbedaan pencatatan (Dr. Erhans Junaedi Yusuf, 2000) :

1. Deposit In Transit
2. Out Standing Check
3. Cek Kosong
4. Jasa Giro
5. Kesalahan Pencatatan dalam mencatat baik dari pihak perusahaan maupun pihak bank

Contoh rekonsiliasi bank

PT. Minan Jaya menyajikan data sebagai berikut :

Catatan kas

Saldo 30 November 2020	Rp 230.000.000
Penerimaan bulan Desember 2020	Rp 120.000.000
Pengeluaran bulan Desember 2020	Rp 150.000.000

Saldo 31 Desember 2020	Rp 200.000.000
------------------------	----------------

Rekening Koran

Saldo 30 November 2020	Rp 200.000.000
Penerimaan bulan Desember 2020	Rp 130.000.000
Pengeluaran bulan Desember 2020	Rp 150.000.000
Saldo 31 Desember 2020	Rp 180.000.000

Penerimaan piutang 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.000.000 dibukukan oleh perusahaan Rp 18.000.000

Penyebab perbedaan antara kas dan rekening koran sebagai berikut:

	<u>30 Nov 2020</u>	<u>31 Des 2020</u>
a) Cek kosong	Rp 110.000.000	Rp 20.000.000
b) Cek yang beredar	Rp 80.000.000	Rp
	90.000.000	

Berdasarkan data diatas dibuat rekonsiliasi bank dengan menggunakan 4 kolom sebagai berikut:

PT. Minan Jaya
Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2020

Keterangan	Saldo 30 November	Penerimaan Desember	Pengeluaran Desember	Saldo 31 Desember
Rekening Koran	200.000.000	130.000.000	150.000.000	180.000.000
cek yang beredar	-		-	
30-Nov-20	80.000.000		80.000.000	-
31-Des-20			90.000.000	90.000.000
Saldo yang benar	120.000.000	130.000.000	160.000.000	90.000.000
Catatan Perusahaan cek kosong	230.000.000	120.000.000	50.000.000	140.000.000
	-		-	
30-Nov-20	110.000.000		110.000.000	
		-		-
31-Des-20		20.000.000		20.000.000
Koreksi Piutang		30.000.000		30.000.000
Saldo yang benar	120.000.000	130.000.000	160.000.000	90.000.000

3.4 Pengendalian dan Penyajian Kas

3.4.1 Pengendalian Kas

Pengendalian kas merupakan pengontrolan keluar masuknya dana perusahaan agar bisa dibukukan secara detail, dengan cara membuka rekening giro di bank, yang mana setiap

pengambilan uangnya harus menggunakan cek/bilyet giro (dengan ketentuan dana yang diambil jumlahnya besar).

Tujuannya untuk mengamankan aset, mencegah dari penyalahgunaan uang kas, serta mendorong efisiensi uang kas. Ada beberapa macam pengendalian terhadap kas (V.Wiratna Sujarweni, 2020 :31)

- a) Terdapat pemisahan tugas antara yang melakukan otorisasi dengan pemegang kas dan pencatat kas.
- b) Pengeluaran kas dengan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain
- c) Penerimaan kas dilakukan dengan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain
- d) Rekonsiliasi bank antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran dari bank
- e) Pencatatan kas masuk dan keluar menggunakan no. Urut dan nomer voucher cek

3.4.2 Penyajian Kas

Penyajian kas tergantung kewenangan dan kebijakan dari manajemen perusahaan, seperti pencatatan jumlah perincian kas ataupun setara kas.

Dalam PSAK juga tidak ada pengaturan mengenai penyajian kas atau setara kas, seperti contoh pada laporan posisi keuangan yang menjelaskan komponen kas.

The original consolidated financial statements included notes
are in Indonesian language

**PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2020
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.4.33,34,36	9.335.416	6.359.104	Cash and cash equivalents
Piutang	2.3.33,34,36			Accounts receivable
Utang	5			Trade
Piutang ketiga - neto		2.380.015	1.095.852	Third parties - net
Piutang berelasi	32	2.893.401	2.933.408	Related parties
Bukan utang				Non-trade
Piutang ketiga		59.349	22.150	Third parties
Piutang berelasi	32	413.990	60.510	Related parties
Persediaan - neto	2.3.6	4.586.940	3.840.090	Inventories - net
Uang muka dan jaminan	7	628.830	169.941	Advances and deposits
Pajak dibayar di muka	2.18	165.439	77.638	Prepaid taxes
Beban dibayar di muka dan aset lancar lainnya	2	52.832	45.542	Prepaid expenses and other current assets
Total Aset Lancar		20.716.233	16.824.925	Total Current Assets

(sumber : (Indofood CBP Sukses makmur, 2020))

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Erhans Junaedi Yusuf, S. A. 2000. *Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia*. Akuntansi. Jakarta: PT. Ercontara Rajawali.
- Indofood CBP Sukses makmur, P. 2020. 'Laporan Keuangan'. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.2* (no date).
- V.Wiratna Sujarweni. 2020. *Pengantar Akuntansi 2*. Edited by P. P. Baru. Yogyakarta.

BAB 4

AKUTANSI ASET TETAP (BERWUJUD)

Oleh Aliah Pratiwi

4.1 Pengertian Dan Karakteristik Aktiva Tetap Berwujud

Pengertian Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva yang memiliki bentuk fisik, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan operasi normalnya serta mempunyai manfaat dalam jangka panjang atau masa kegunaan yang relatif permanen. Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada PSAK No. 16 Edisi Revisi 2002, disebutkan bahwa Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang (1) dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk keperluan administrasi dan (2) diharapkan dapat digunakan lebih dari satu periode.

Atas dasar pengertian Aktiva Tetap Berwujud tersebut maka Aktiva Tetap Berwujud mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mempunyai bentuk fisik.

Aktiva Tetap Berwujud tentu saja mempunyai wujud fisik. Dengan kata lain, dapat dilihat atau diraba.

2. Relatif permanen.

Kata permanen ini menunjuk pada suatu periode (waktu) yang panjang. Panjang di sini mempunyai arti bahwa waktu pemakaian aktiva tetap tersebut melebihi periode akuntansi yang ditentukan dalam penyusunan laporan keuangan. Biasanya sebagai patokan untuk dapat dikategorikan sebagai aktiva tetap umurnya harus lebih

dari satu tahun.

3. Digunakan dalam operasi perusahaan.

Selain aktiva tetap harus relatif permanen juga harus digunakan dalam operasi normal perusahaan. Dengan demikian, aktiva tetap yang tidak digunakan untuk operasional seperti tanah yang dibeli untuk perluasan, namun belum digunakan untuk tujuan tersebut tidak termasuk dalam pengertian aktiva tetap.

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali.

Aktiva tetap dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Dengan kata lain, sesuai dengan sifatnya yang permanen dan tujuan utamanya untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan maka aktiva tetap tersebut tidak boleh dikelompokkan sebagai barang dagangan.

Aktiva Tetap Berwujud dapat dibedakan atas Aktiva Tetap Berwujud yang umurnya terbatas, seperti mesin, kendaraan, dan lain-lain, dan Aktiva Tetap Berwujud yang tidak terbatas umurnya, seperti tanah. Perlakuan kedua jenis Aktiva Tetap Berwujud jika dihubungkan dengan penyusutan (depresiasi) maka Aktiva Tetap Berwujud yang disebut pertama merupakan aktiva tetap yang di susut, sedangkan yang kedua tidak di susut.

4.2 Harga Perolehan

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan demikian, seluruh pengeluaran untuk memperoleh suatu aktiva tetap, baik yang berupa kas maupun yang berupa setara kas, merupakan komponen harga perolehan. Menurut

PSAK No. 16 Edisi Revisi Tahun 2002, Harga perolehan suatu aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk bea impor dan PPN Masukan Tak Boleh Restitusi (*non-refundable*), dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aktiva tersebut dalam kondisi siap pakai, setiap potongan dagang dan rabat yang dikurangkan dari harga pembelian.

Berikut ini akan dikemukakan penentuan harga perolehan untuk beberapa jenis Aktiva Tetap Berwujud, yakni tanah, bangunan, mesin dan alat pabrik, mebel dan peralatan kantor, kendaraan, alat-alat kecil, dan alat-alat pembungkus.

1. Harga Perolehan Tanah

Harga perolehan untuk tanah terdiri atas pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam rangka pemilikannya yang meliputi, antara lain harga beli, komisi pembelian, bea balik nama, pajak-pajak yang menjadi beban pembeli, serta biaya perataan dan pembersihan tanah. Di samping itu, mungkin pula biaya pembongkaran bangunan di atas tanah tersebut bila kita membeli sebidang tanah yang ada bangunannya tetapi sudah tua yang tidak akan kita gunakan.

2. Harga Perolehan Bangunan

Harga perolehan bangunan, antara lain meliputi harga beli, biaya perbaikan sebelum gedung itu dipakai, komisi pembelian, bea balik nama, dan lain-lain. Bila bangunan dibuat sendiri maka harga perolehannya meliputi, antara lain biaya-biaya pembuatan bangunan, biaya perencanaan gambar, biaya bunga kredit pembangunan bangunan itu dan sebagainya.

3. Harga Perolehan Mesin dan Alat Pabrik

Harga perolehan Mesin dan Alat Pabrik meliputi, antara lain pengeluaran-pengeluaran, seperti harga faktur, biaya pengangkutan, biaya asuransi pengangkutan, biaya pemasangan, dan biaya percobaan.

4. Harga Perolehan Mebel dan Peralatan Kantor

Harga perolehan mebel dan peralatan kantor meliputi, antara lain harga faktur, biaya pengangkutan, dan pajak-pajak yang jadi tanggungan pembeli. Mebel meliputi: meja, kursi, karpet, almari, dan lain-lain, sedangkan peralatan kantor meliputi mesin ketik, kalkulator, dan sebagainya.

5. Harga Perolehan Kendaraan dan Alat-Alat *Transport*

Yang termasuk harga perolehan kendaraan adalah harga faktur, bea balik nama, biaya angkut, dan lain-lain. Pengeluaran, seperti izin trayek dan asuransi kendaraan tersebut bukan merupakan harga perolehan. Pajak kendaraan bermotor yang dibayar tiap periode juga bukan merupakan komponen harga perolehan.

6. Harga Perolehan Alat-Alat Kecil

Yang dimaksud dengan alat-alat kecil adalah aktiva tetap yang banyak macamnya, akan tetapi relatif kecil nilainya yang umumnya dipakai aktif dalam kegiatan produksi. Contohnya, dreii, catut, pukul besi, dan lain-lain. Alat-alat kecil dibedakan atas alat-alat mesin (*machine tools*) dan alat-alat kerja tangan (*hand tools*). Harga perolehannya adalah harga beli dan biaya- biaya untuk memperolehnya.

7. Harga Perolehan Alat-Alat Bungkus (tempat barang)

Alat bungkus atau tempat barang adalah barang-barang yang dipakai sebagai tempat produk yang dijual, seperti botol, drum, tangki, dan lain-lain yang biasanya dikembalikan oleh pembeli dan harga tempat barang itu tidak termasuk dalam harga jual. Harga perolehannya adalah harga beli dan biaya- biaya untuk perolehannya.

4.3 Cara Perolehan Aktiva Tetap Berwujud

Ada beberapa macam cara memperoleh suatu Aktiva Tetap Berwujud, diantaranya :

1. Pembelian.

Adalah Aktiva Tetap Berwujud yang diperoleh dari transaksi pembelian dengan pihak lain. Transaksi pembelian dicerminkan dengan adanya pengeluaran kas oleh pihak pembeli. Pembelian ini bisa dilakukan secara tunai, secara kredit, dan bisa juga dilakukan secara *lumpsum*, artinya pembelian beberapa jenis Aktiva Tetap Berwujud dengan satu hargagabungan.

2. Membuat sendiri.

Perusahaan bisa memperoleh suatu Aktiva Tetap Berwujud dengan jalan membuatnya sendiri. Dalam hal membuat Aktiva Tetap Berwujud sendiri, perusahaan membeli bahannya, mengupah tenaga kerja, dan membiayai pembuatannya.

3. Pertukaran dengan Aktiva Tetap Berwujud milik perusahaan.

Pertukaran Aktiva Tetap Berwujud bisa dilakukan dengan disertai adanya tambahan kas ataupun tidak. Pertukaran tersebut bisa merupakan pertukaran antar-Aktiva Tetap Berwujud sejenis maupun dengan lain jenis.

4. Pertukaran dengan surat berharga perusahaan.

Dengan menggunakan surat berharga sebagai penukarnya, Aktiva Tetap Berwujud yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat diperoleh. Surat berharga yang biasa digunakan untuk “membeli” suatu Aktiva Tetap Berwujud adalah saham atau Surat Utang Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

5. Pemberian pihak lain atau dari hasil temuan.

Aktiva Tetap Berwujud yang diperoleh dari pemberian maupun yang berasal dari temuan tidak mengakibatkan

timbulnya pengorbanan ekonomis bagi perusahaan.

4.4 Penyusutan (Depresiasi)

Apabila suatu perusahaan memperoleh suatu Aktiva Tetap Berwujud maka aktiva tersebut akan digunakan dalam operasi perusahaan. Artinya tidak ada maksud untuk menjualnya kembali. Dengan pemilikan suatu aktiva tetap diharapkan dapat diperoleh dan ditingkatkan penghasilan di masa-masa yang akan datang. Misalnya sebuah truk di perusahaan pengangkutan atau sebuah mesin di suatu pabrik. Kalau truk atau mesin tersebut dipakai selama bertahun-tahun maka apa yang terjadi? Tentu truk atau mesin tersebut akan menjadi rusak atau aus sejalan dengan waktu dan akibat pemakaiannya. Nah, persoalannya sekarang adalah kalau perusahaan membeli truk tersebut pada awal tahun 2017 dengan harga perolehan sebesar Rp 75.000.000,00 dan setelah tahun kelima atau akhir tahun 2021 truk secara ekonomis sudah tidak bisa dipergunakan lagi maka bagaimana dengan pengeluaran Rp75.000.000,00 tersebut? Kita mungkin berpikir rugi Rp75.000.000,00 dan mungkin akan beli lagi dari hasil pemakaian truk tersebut. Itu sudah benar, Namun persoalannya kapan harus mengakui dan mencatat kerugian itu? Pada tahun 2017? Atau di tahun 2021? Karena truk tersebut dipergunakan selama 5 tahun. Dengan kata lain, jasa truk tersebut dinikmati selama tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 maka pengeluaran yang telah dilakukan sebesar Rp75.000.000,00 tersebut harus dialokasikan ke tahun-tahun tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah suatu harga perolehan atas suatu aktiva tetap harus dialokasikan ke periode-periode di mana penghasilan-penghasilan melalui penggunaan aktiva tersebut direalisasikan. Yang dimaksud dengan periode, yaitu periode

akuntansi atau juga tahun buku yang biasanya menggunakan tahun kalender.

Bila sudah dipahami uraian di atas berarti sudah memahami pengertian penyusutan. Istilah penyusutan untuk aktiva tetap (berwujud) adalah **depresiasi**.

Pengertian penyusutan dari *The Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants* berikut ini:

“Akuntansi penyusutan adalah suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk membagikan harga perolehan atau nilai dasar lain dari aktiva tetap berwujud, dikurangi nilai sisa (kalau ada), selama umur kegunaan unit aktiva itu yang ditaksir (mungkin berupa suatu kumpulan aktiva-aktiva) dalam suatu cara yang sistematis dan rasional. Ini proses alokasi, bukan penilaian. Beban penyusutan untuk suatu periode adalah sebagian dari jumlah total beban itu yang dengan sistem tersebut dialokasikan ke tahun yang bersangkutan. Meskipun di dalam alokasi itu diperhitungkan hal-hal yang terjadi selama tahun itu, tidaklah dimaksudkan sebagai suatu alat pengukur terhadap akibat-akibat dari kejadian-kejadian itu”.

4.5 Faktor-Faktor Penyebab Penyusutan

1. Faktor-faktor Fisik (*Intern*)

Pengertiannya bahwa nilai guna aktiva tersebut menurun karena memang keadaan fisiknya yang mulai turun. Penurunan itu umumnya disebabkan oleh hal-hal berikut.

a. Pemakaian dan kerusakan

Pada umumnya penurunan nilai guna aktiva tetap disebabkan oleh kedua faktor ini.

b. Keruntuhan

Penurunan nilai guna juga bisa disebabkan faktor keruntuhan. Kalaupun hal tersebut terjadi maka biasanya

terjadi penurunan fisik yang sangat drastis.

c. Faktor alamiah atau berlalunya waktu

Faktor ini meliputi, antara lain perubahan cuaca, hujan, panas, dan hal-hal lain yang disebabkan berlalunya waktu.

d. Faktor-faktor tidak terduga

Penurunan fisik aktiva tetap mungkin pula terjadi karena hal-hal di luar dugaan manusia, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain.

2. Faktor-faktor Fungsional (*Ekstern*)

Suatu aktiva mungkin secara fungsional sudah tidak menguntungkan lagi walaupun secara fisik masih dapat dioperasikan. Perusahaan yang mempunyai aktiva tetap haruslah memperhitungkan faktor-faktor fungsional ini di dalam penentuan beban biaya penyusutan.

Faktor-faktor fungsional itu, antara lain berikut ini.

a. Ketinggalan zaman (*obsolescence*)

Kemajuan teknologi yang sangat pesat kerap kali membuat aktiva tetap yang belum lama dimiliki sudah ketinggalan zaman. Adanya penemuan-penemuan baru mengakibatkan aktiva yang dimiliki saat sekarang ketinggalan zaman. Hal ini harus diperhatikan oleh manajemen terutama dalam hal penaksiran umur ekonomis aktiva tetapnya dalam rangka beban biaya penyusutan. Dengan demikian, bukan tidak mungkin suatu perusahaan akan mengganti aktiva tetapnya yang masih mempunyai kondisi fisik yang baik, tetapi sudah tidak efisien lagi dalam menghadapi persaingan.

b. Ketidacukupan (*inadequacy*)

Dalam keadaan di mana jumlah barang yang diminta meningkat cukup tinggi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhinya lagi melalui pemanfaatan aktiva tetap lama maka perusahaan tentu akan berusaha untuk

memenuhinya dengan mengganti aktiva tetap lama dengan yang baru. Bila kemungkinan-kemungkinan seperti ini diperkirakan akan terjadi maka perusahaan harus memperhitungkannya dalam penaksiran umur ekonomis aktiva tetap guna memperoleh pembebanan biaya penyusutan yang layak.

c. Pola pemakaian aktiva tetap

Pola pemakaian aktiva tetap adalah dari pengambilan manfaat aktiva tetap tersebut yang berkaitan dengan sumbangan (kontribusi) penghasilan yang diberikan oleh aktiva tetap untuk tiap periode akuntansi. Apabila suatu aktiva tetap memberikan kontribusi penghasilan yang sama besarnya untuk tiap periode akuntansi selama masa penggunaan aktiva tetap tersebut maka penyusutan harus dilakukan sama besar untuk masing-masing periode tersebut. Apabila kontribusi penghasilan yang diberikan tidak sama besar untuk tiap periode akuntansi maka secara teoritis aktiva tetap tersebut harus disusutkan secara proporsional dengan kontribusi penghasilannya.

4.6 Faktor-Faktor Yang Menentukan Dalam Pembebanan Penyusutan

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan, yaitu berikut ini:

1. Harga Perolehan (*Costs*)

Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.

2. Umur Ekonomis (*Useful-Life*)

Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
- b. Keusangan karena waktu.
- c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.

3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (*Salvage Value*)

Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya.

Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (*junk value*) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya

lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.

4. Metode Penyusutan

Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva.

Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

4.7 Pencatatan Dan Pelaporan Penyusutan (Depresiasi)

Depresiasi sebagai alokasi harga perolehan dicatat dengan mendebit rekening “Biaya Depresiasi” dan mengkredit rekening “Akumulasi Depresiasi”. Pendebitan rekening Biaya Depresiasi adalah merupakan pengakuan pembebanan biaya untuk suatu periode akuntansi atas pengambilan manfaat suatu aktiva tetap. Sedangkan pengkreditan rekening Akumulasi Depresiasi merupakan pencatatan besarnya harga perolehan aktiva tetap yang telah di susut. Rekening akumulasi depresiasi

ini di dalam neraca disajikan sebagai pengurang rekening aktiva tetap yang bersangkutan sehingga dapat diketahui berapa nilai buku aktiva tetap (harga perolehan aktiva tetap yang belum di susut) pada tanggal neraca. Rekening akumulasi depresiasi hanya akan di debit apabila aktiva tetap diberhentikan atau dilakukan suatu koreksi/pembetulan terhadapnya. Seperti halnya dengan pos aktiva tetap yang dicatat secara terpisah untuk masing-masing jenisnya maka rekening biaya depresiasi maupun rekening akumulasi depresiasi juga dicatat terpisah untuk masing-masing jenis dengan pemisahan yang dilakukan pada aktiva tetap yang bersangkutan.

Contoh:

Toko Lawata melakukan penyusutan mesin perusahaan untuk periode akuntansi 2021 sebesar Rp250.000,00. Jurnal untuk mencatat depresiasi tersebut adalah berikut ini.

Biaya depresiasi mesin	Rp250.000,00
Akumulasi depresiasi mesin	Rp250.000,00
(mencatat biaya depresiasi mesin)	

4.8 Macam-Macam Metode Depresiasi

Metode depresiasi merupakan suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu Anda ketahui, yaitu berikut ini.

1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas).
2. Metode Garis Lurus.

3. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun.
 - a. Metode Jumlah Angka Tahunan.
 - b. Metode Persentase Tetap dari Nilai Buku.

4.8.1 Metode Aktivitas

Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode aktivitas (*activity method*). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk dapat menentukan kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis, demikian pula tidaklah gampang menentukan penggunaan manfaat ekonomis suatu aktiva tetap untuk satu periode. Maka dari itulah, secara praktis metode ini cukup sulit untuk memberikan hasil depresiasi yang tepat.

Contoh 1

PT Murni mempunyai sebuah mesin produksi yang diperkirakan selama masa pakainya mampu memproduksi sebanyak 1.000.000 unit, dan apabila digunakan secara nonstop dia akan bisa bekerja selama 50.000 jam kerja. Harga perolehan mesin tersebut adalah Rp15.500.000, sedangkan

nilai residunya diperkirakan sebesar Rp500.000. Apabila pada tahun 2017 PT Murni menghasilkan produk sebanyak 100.000 unit maka pada tahun tersebut harus diakui biaya depresiasi sebesar:

$$\frac{100.000 \text{ unit}}{1.000.000 \text{ unit}} \times (Rp \ 15.500.000 - Rp \ 500.000) = Rp \ 1.500.000$$

Jurnal 31 des: Beban Penyusutan	Rp. 1.500.000
Akumulasi penyusutan	Rp. 1.500.000

Jika perusahaan dalam menghitung depresiasi tidak menggunakan jumlah unit yang diproduksi sebagai dasarnya, melainkan menggunakan jam kerja mesin dan diketahui pada tahun 2017 mesin produksi tersebut digunakan selama 5.000 jam kerja maka depresiasi dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5.000 \text{ jam}}{50.000 \text{ jam}} \times (Rp \ 15.500.000 - Rp \ 500.000) = Rp \ 1.500.000$$

Jurnal 31 des: Beban Penyusutan	Rp. 1.500.000
Akumulasi penyusutan	Rp. 1.500.000

Apabila diketahui bahwa pada tahun 2017 PT Murni mempekerjakan mesin produksinya selama 4.000 jam maka depresiasi untuk tahun 2017 adalah berikut ini:

$$\frac{4.000 \text{ jam}}{50.000 \text{ jam}} \times (Rp \ 15.500.000 - Rp \ 500.000) = Rp \ 1.200.000$$

Jurnal 31 des: Beban Penyusutan	Rp. 1.200.000
Akumulasi penyusutan	Rp. 1.200.000

4.8.2 Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*)

Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai) aktiva tetap yang bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu.

Contoh 2:

Dengan menggunakan data pada Contoh 1 apabila mesin produksi tersebut digunakan selama 5 tahun maka depresiasi per tahun dapat dihitung sebagai berikut.

$$\frac{Rp\ 15.500.000 - Rp\ 500.000}{5\ tahun} = Rp\ 3.000.000$$

Adapun program depresiasi mesin untuk 5 tahun (selama umur ekonomisnya) dapat Anda lihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 : Program Depresiasi Dengan Metode Garis Lurus

Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Depresiasi Per Tahun (Rp)	Akum. Depresiasi Akhir Tahun (Rp)	Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)
0	-	-	-	Rp15.500.000
2017	Rp15.500.000	Rp3.000.000	Rp 3.000.000	Rp12.500.000
2018	Rp15.500.000	Rp3.000.000	Rp 6.000.000	Rp 9.500.000
2019	Rp15.500.000	Rp3.000.000	Rp 9.000.000	Rp 6.500.000
2020	Rp15.500.000	Rp3.000.000	Rp12.000.000	Rp 3.500.000
2021	Rp15.500.000	Rp3.000.000	Rp15.000.000	Rp 500.000

Jurnal 31 des tahun pertama :

Beban Penyusutan	Rp. 3.000.000
Akumulasi penyusutan	Rp. 3.000.000

Nb : Untuk tahun ke 2 s/d ke 5 juga di buat jurnal yang sama, nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan.

4.8.3 Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun

Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasiyang menurun ada 2, yaitu berikut ini.

1. Metode Jumlah Angka Tahun (*Sum of The Year's Digits Method*)
2. Metode Persentase Tetap Dari Nilai Buku (Metode Saldo Yang Menurun/*Declining Balance Method*)

Kedua metode tersebut didasarkan pada asumsi bahwa manfaat yang dapat diberikan oleh suatu aktiva tetap menurun sejalan dengan makin bertambahnya umur aktiva tetap tersebut. Dengan demikian, aktiva tetap harus di depresiasi dengan jumlah besar pada tahun-tahun awal penggunaannya dan semakin mengecil untuk tahun-tahun berikutnya.

a. Metode Jumlah Angka Tahun

Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut. Sebagai contoh, dengan menggunakan data pada Contoh 1.17. maka pada tahun pertama mesin produksi masih bisa digunakan selama 5 tahun, sedangkan nilai penjumlahan umur penggunaan mesin tersebut adalah 15, yaitu $1 + 2 + 3 + 4 + 5$. Dengan demikian, besarnya proporsi untuk mendepresiasi

mesin pada tahun pertama adalah sebesar $\frac{5}{15}$. Untuk tahun kedua karena pada tahun tersebut sisa umur penggunaan mesin tinggal 4 tahun maka besarnya proporsi untuk mendepresiasi mesin adalah $\frac{4}{15}$, dan seterusnya sampai tahun ke-5. Dengan menggunakan proporsi untuk masing- masing tahun maka depresiasi per tahun dapat dihitung sebagai berikut:

Tahun ke-1	$\frac{5}{15} \times (\text{Rp. } 15.500.000 - \text{Rp. } 500.000)$	Rp. 5.000.000
Tahun ke-2	$\frac{4}{15} \times (\text{Rp. } 15.500.000 - \text{Rp. } 500.000)$	Rp. 4.000.000
Tahun ke-3	$\frac{3}{15} \times (\text{Rp. } 15.500.000 - \text{Rp. } 500.000)$	Rp. 3.000.000
Tahun ke-4	$\frac{2}{15} \times (\text{Rp. } 15.500.000 - \text{Rp. } 500.000)$	Rp. 2.000.000
Tahun ke-5	$\frac{1}{15} \times (\text{Rp. } 15.500.000 - \text{Rp. } 500.000)$	Rp. 1.000.000
Jumlah		Rp. 15.000.000

Sedangkan program depresiasi untuk 5 tahun, seperti Tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2 : Program Depresiasi dengan Metode Jumlah Angka Tahun

Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Depresiasi Per Tahun (Rp)	Akum. Depresiasi Akhir Tahun (Rp)	Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)
0	-	-	-	Rp15.500.000
2017	Rp15.500.000	Rp5.000.000	Rp 5.000.000	Rp10.500.000
2018	Rp15.500.000	Rp4.000.000	Rp 9.000.000	Rp 6.500.000
2019	Rp15.500.000	Rp3.000.000	Rp12.000.000	Rp 3.500.000
2020	Rp15.500.000	Rp2.000.000	Rp14.000.000	Rp 1.500.000
2021	Rp15.500.000	Rp1.000.000	Rp15.000.000	Rp 500.000

Jurnal 31 des tahun pertama :

Beban Penyusutan	Rp. 5.000.000
Akumulasi penyusutan	Rp. 5.000.000

Nb : Untuk tahun ke 2 s/d ke 5 juga di buat jurnal yang sama, nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan.

b. Metode Saldo yang Menurun

Dalam metode Saldo Yang Menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun. Besarnya persentase tersebut dapat dihitung sebagai berikut.

$$(1 - r)^n \times HP = NR$$

$$(1 - r)^n = \frac{NR}{HP}$$

$$1 - r = \sqrt[n]{\frac{NR}{HP}}$$

$$r = 1 - \sqrt[n]{\frac{NR}{HP}}$$

di mana:

r = besarnya persentase untuk depresiasi.

NR = nilai residu aktiva tetap yang di depresiasi.

HP = harga perolehan aktiva tetap yang di depresiasi.

n = taksiran umur menggunakan aktiva tetap.

Dengan demikian, apabila kita menggunakan data dari Contoh 1.maka besarnya persentase untuk tarif depresiasi dihitung sebesar:

$$r = 1 - \sqrt[5]{\frac{500.000}{15.500.000}}$$

$$r = 0,4968 \text{ atau } 49,68\%$$

Program depresiasi untuk waktu 5 tahun tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 : Program Depresiasi dengan Metode Saldo yang Menurun

Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Depresiasi Tahun Berjalan 0,4968 x NB (Rp)	Akum. Depresiasi Akhir Tahun (Rp)	Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)
2017	Rp15.500.000	Rp7.700.632,95	Rp 7.700.632,95	Rp7.799.367,05
2018	Rp15.500.000	Rp3.874.842,77	Rp11.575.475,72	Rp3.924.524,28
2019	Rp15.500.000	Rp1.949.762,65	Rp13.525.238,37	Rp1.974.761,63
2020	Rp15.500.000	Rp 981.091,26	Rp14.506.329,63	Rp 993.670,37
2021	Rp15.500.000	Rp 493.670,37	Rp15.000.000,00	Rp 500.000,00

Jurnal 31 des tahun pertama :

Beban Penyusutan	Rp. 7.700.63,95
Akumulasi penyusutan	Rp. 7.700.63,95

Nb : Untuk tahun ke 2 s/d ke 5 juga di buat jurnal yang sama, nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan.

Besarnya persentase sebagai tarif depresiasi pada metode saldo yang menurun selain menggunakan rumus di atas, bisa pula menggunakan persentase yang besarnya 2 kali

tarif depresiasi dengan metode garis lurus. Penggunaan tarif sebesar 2 kali tarif garis lurus tersebut biasa disebut dengan *Double Declining Balance*. Dari data pada Contoh 1. persentase depresiasi tiap tahun adalah 20% atau 5/5. Sehingga jika menggunakan metode *double declining balance*, persentase untuk tarif depresiasi adalah $2 \times 20\% = 40\%$. Dengan demikian, program depresiasi selama 5 tahun adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4 : Program Depresiasi dengan Metode *Double Declining Balance*

Tahun	Harga Perolehan (Rp)	Depresiasi Tahun Berjalan $0,4 \times \text{NB}$ (Rp)	Akum. Depresiasi Akhir Tahun (Rp)	Nilai Buku Akhir Tahun (Rp)
2017	Rp 15.500.000	Rp 6.200.000	Rp 6.200.000	Rp 9.300.000
2018	Rp 15.500.000	Rp 3.720.000	Rp 9.920.000	Rp 5.580.000
2019	Rp 15.500.000	Rp 2.232.000	Rp 12.152.000	Rp 3.348.000
2020	Rp 15.500.000	Rp 1.339.200	Rp 13.491.200	Rp 2.008.800
2021	Rp 15.500.000	Rp 1.508.800*)	Rp 15.000.000	Rp 500.000

*) Depresiasi untuk tahun ke-5 tidak dihitung atas dasar tarif, melainkan dihitung dengan mengurangkan nilai residu dari nilai buku awal tahun tersebut.

Jurnal 31 des tahun pertama :

Beban Penyusutan	Rp. 6.200.000
Akumulasi penyusutan	Rp. 6.200.000

Nb : Untuk tahun ke 2 s/d ke 5 juga di buat jurnal yang sama, nilainya diambil dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jusup Haryono. 2014. Dasar-dasar akuntansi jilid 2. STIE
YKPN. Yogyakarta.
PSAK No. 16 Edisi Revisi 2002

BAB 5

AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

Oleh Zainal Potton

5.1 Pengertian Akuntansi Aset Tidak Berwujud

Akuntansi aset tidak berwujud adalah suatu cabang akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat, menilai, dan mengungkapkan aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak dapat dilihat, diraba, atau dipegang secara fisik, seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Dalam akuntansi aset tidak berwujud, aset tidak berwujud harus diakui pada saat mereka diperoleh atau diciptakan, dan harus diukur pada biaya perolehan atau biaya yang dikeluarkan untuk menciptakannya. Aset tidak berwujud harus diakui sebagai aset jika dianggap dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan diharapkan akan tersedia untuk digunakan lebih dari satu periode akuntansi. Akuntansi aset tidak berwujud juga bertanggung jawab untuk menilai aset tidak berwujud pada saat tanggal laporan keuangan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode nilai wajar, yang menentukan nilai aset dengan membandingkan harga pasar aset tersebut dengan harga pasar aset yang serupa. Selain itu, akuntansi aset tidak berwujud juga bertanggung jawab untuk menentukan apakah aset tidak berwujud tersebut harus diakumulasikan atau dihapuskan dari laporan keuangan. Akuntansi aset tidak berwujud merupakan bagian penting dari akuntansi keuangan, karena aset tidak berwujud seringkali merupakan sumber daya yang sangat penting bagi perusahaan. Aset tidak berwujud

dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan, seperti meningkatkan pendapatan perusahaan melalui penjualan hak paten atau menurunkan biaya produksi melalui penggunaan merek dagang. Oleh karena itu, akuntansi aset tidak berwujud sangat penting untuk memastikan bahwa aset tidak berwujud tersebut diakui dan diukur dengan benar dalam laporan keuangan.

Menurut PSAK No.19 (Revisi 2010), definisi aset yang tidak memiliki penilaian yang terbatas adalah aset yang tidak dapat diidentifikasi secara moneter tanpa penilaian yang terbatas. Apalagi PSAK No.19 (Revisi 2010), paragraf 10 menyebutkan bahwa ada tiga kriteria utama aset yang tidak berperilaku baik dari definisi yang ada, yaitu: Pertama, keteridentifikasian, dalam paragraf 11 PSAK No.19 (Revisi 2010), menyatakan bahwa keteridentifikasian benda yang tak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan goodwill. Perbedaan yang terlihat adalah bahwa goodwill terjadi sebagai hasil dari proses bermitra dengan perusahaan yang berkomitmen pada keunggulan. Manfaat ekonomi diantisipasi muncul dari kombinasi aset yang dapat diidentifikasi atau dari aset yang, jika dipertimbangkan secara individual, tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dalam transaksi keuangan, meskipun sebenarnya tersedia untuk dibeli. Selain itu, jika aset yang dimaksud dapat diterjemahkan, aset apa pun dapat dengan jelas disamakan dengan itikad baik. Dalam paragraf 12 disebutkan bahwa suatu aset tertentu dikatakan "dapat dipisahkan" jika suatu perusahaan dapat menjual, membeli, mendistribusikan, atau dengan cara lain memanfaatkan manfaat ekonomi global yang terdapat dalam aset tersebut tanpa memperhitungkan manfaat akun yang mungkin timbul dari penggunaan aset lain dengan cara yang mirip dengan yang dimaksud untuk menghasilkan pendapatan. Dapat dipisahkan tidak selalu menjadi prasyarat keteridentifikasian karena perusahaan dapat melakukan

pengenalan dengan menggunakan metode lain seperti misalnya melalui menjual hak hukum, proyek internasional yang bertujuan menciptakan (Panggabean, 2013)

Kedua, PSAK No. 19 (Revisi 2010) menyoroti pengendalian aset tidak berwujud selain kriteria pengidentifikasian pada paragraf 13 dokumen tersebut. Jika suatu perusahaan memiliki kekuatan untuk meraup keuntungan finansial di masa depan dari suatu aset dan otoritas untuk membatasi akses pihak lain ke keuntungan tersebut, perusahaan tersebut dikatakan "mengendalikan aset." Kekuasaan perusahaan untuk mengendalikan keuntungan finansial masa depan dari aset tidak berwujud biasanya dihasilkan dari hak hukum yang dapat ditegakkan di pengadilan. Akan lebih sulit bagi perusahaan untuk membuktikan pengendalian jika hak hukum tersebut tidak ada. Perusahaan dapat menggunakan bentuk kontrol alternatif atas imbalan finansial, oleh karena itu pelaksanaan hak tidak memerlukan kontrol. Pengetahuan pasar atau keahlian teknis dapat menghasilkan imbalan ekonomi di masa depan. Jika, misalnya, bisnis memiliki pengetahuan yang dilindungi oleh hak hukum seperti hak cipta dan batas perjanjian perdagangan (sejauh yang diizinkan oleh undang-undang) atau oleh tanggung jawab hukum sebagai karyawan untuk menjaga kerahasiaan, maka bisnis tersebut memiliki kendali atas manfaat ekonomi tersebut. Ketiga, keuntungan finansial masa depan dari aset tidak berwujud dapat datang melalui pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau keuntungan lain yang terkait dengan penggunaan aset tersebut oleh bisnis. Penerapan kekayaan intelektual dalam proses produksi, misalnya, menurunkan biaya produksi di masa depan daripada meningkatkan pendapatan di masa depan.

Berkembangnya perusahaan akan bergantung pada kinerja perusahaan dalam mengelola aset berwujud

perusahaan dengan pengetahuan (aset tidak berwujud) yang dimiliki perusahaan. Sehingga sebesar apapun aset berwujud yang dimiliki, apabila perusahaan tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam mengolah aset berwujud tersebut, maka perusahaan akan sulit berkembang. Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik pengelolaan aset tidak berwujud (intangible assest) telah meningkat secara dramatis. Penelitian yang dilakukan Gleason dan Klock pada industri kimia dan farmasi di Amerika Serikat pada tahun 2003, menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan komponen aset tidak berwujud yang sangat mempengaruhi nilai perusahaan di samping komponen aset tidak berwujud lainnya. (Trisnajuna, Made, 2015)

5.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tak Berwujud

Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud adalah proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan bagaimana aset tak berwujud seperti hak cipta, merek dagang, dan lisensi harus diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, tetapi memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Pengakuan aset tak berwujud dilakukan ketika perusahaan memutuskan bahwa aset tersebut memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset dalam laporan keuangan. Kriteria ini meliputi:

Manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari aset tak berwujud tersebut. Ada pengorbanan ekonomi yang telah dilakukan atau diharapkan untuk mendapatkan aset tak berwujud tersebut. Dapat diukur dengan andal dan dapat diidentifikasi secara terpisah dari aset lainnya. Setelah aset tak berwujud diakui, perusahaan kemudian harus menentukan cara untuk mengukur aset tersebut. Biasanya, aset tak

berwujud diukur pada nilai wajar pada saat diakui. Nilai wajar adalah harga yang mungkin dibayar oleh pembeli yang terbiasa dan pembeli yang terbiasa adalah pembeli yang mengetahui semua informasi yang relevan tentang aset tersebut. Pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud merupakan bagian penting dari proses penyusunan laporan keuangan, karena aset tak berwujud seringkali memiliki nilai yang signifikan bagi perusahaan. Dengan memahami bagaimana aset tak berwujud diakui dan diukur, perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Aset tidak berwujud hanya dapat diakui jika dan hanya sepanjang aset tersebut (a) memenuhi definisi aset tidak berwujud, (b) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, dan (c) biaya perolehan aset dapat diukur dengan akurasi yang wajar. Hal ini dinyatakan dalam PSAK No. 19 (Revisi 2010), paragraf 18 dan 21. Potensi manfaat ekonomis masa depan aset tidak berwujud harus dievaluasi dengan menggunakan asumsi yang wajar dan dapat diterima, yang merupakan proyeksi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang akan ada sepanjang umur aset. Hidup yang berguna. Korporasi juga menimbang bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tidak berwujud, menempatkan fokus pada bukti eksternal, untuk menentukan tingkat kepastian bahwa akan ada manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan dari penggunaan aset tidak berwujud. Sumber daya tak berwujud ini menawarkan hak hukum tertentu atau keuntungan bisnis tertentu. Menurut pendapat APB No.17, aset tidak berwujud umumnya dapat diperoleh dengan berbagai cara, termasuk pembelian internal dan pengembangan. Perusahaan dapat memperkirakan nilai aset tidak berwujud dengan cara berikut dengan memahami bagaimana aset tersebut diperoleh. Pembelian didahulukan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari pihak ketiga dinilai sebesar biaya perolehan, baik nilai tunai atau nilai pasar wajar

yang dibayarkan atau nilai kini kewajiban terkait. Harga beli, biaya legal, dan biaya tak terduga lainnya termasuk dalam nilai akuisisi, demikian pula semua biaya lain yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tidak berwujud hingga dapat digunakan. Selanjutnya, PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 25 menetapkan bahwa biaya perolehan aset tidak berwujud biasanya dapat ditentukan secara wajar jika dibeli secara terpisah. Jika pembayaran dilakukan secara tunai atau bentuk uang lainnya, akan jelas apa itu. (Panggabean, 2013)

Biaya perolehan aset tidak berwujud terdiri dari harga pembelian, bea masuk (impor), pajak yang tidak dapat dikembalikan, dan semua biaya yang terkait langsung untuk mendapatkan aset yang layak pakai, seperti biaya profesional untuk penasihat di bidang hukum. Jika ada diskon atau rabat, biaya aset dikurangi dengan diskon atau rabat tersebut. Ketika pembayaran aset tidak berwujud ditunda melewati waktu penjualan kredit standar, biaya perolehannya setara dengan nilai tunai, dan selisih antara jumlah tersebut dan total pembayaran dicatat sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali jika dikapitalisasi. Jika aset tidak berwujud dibeli dengan saham atau ditukar dengan aset lain, nilai perolehannya sama dengan nilai pasar wajar aset atau nilai pasar wajar aset tidak berwujud, tergantung pada apakah metode evaluasi menggunakan bukti yang lebih meyakinkan. Menurut PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 28, aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah dengan aset tidak berwujud lain yang jenisnya berbeda atau dengan aset lain. Setelah dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diserahkan, harga perolehan aset tidak berwujud dihitung sebesar nilai wajar aset yang diterima, yaitu sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan. Penciptaan atau pengembangan internal adalah yang kedua. Aset tak berwujud yang dikembangkan secara internal membuatnya sangat menantang untuk menilai mereka. Secara umum, pembiayaan langsung

digunakan untuk menutupi biaya yang terkait dengan penciptaan aset tidak berwujud. Akibatnya, biaya langsung dibiayai bahkan ketika korporasi terlibat dalam penelitian dan pengembangan internal yang memerlukan beban yang cukup besar untuk menghasilkan aset tidak berwujud. Ada keuntungan dan kerugian dari pembangkitan internal aset tidak berwujud ini. Hanya biaya langsung untuk memperoleh aset tidak berwujud yang dapat dikapitalisasi di dalam negeri, seperti pengeluaran hukum, yang dapat dikurangkan dari banyak argumen yang dibuat mengenai aset tidak berwujud. Menurut PSAK 22: Penggabungan Bisnis, jika suatu aset tidak berwujud diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis, harga perolehan aset tidak berwujud tersebut adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal akuisisi, sebagaimana ditunjukkan dalam PSAK No.19 (Revisi 2010), paragraf 33. Dalam beberapa kasus, aset tidak berwujud yang diperoleh melalui penggabungan perusahaan hanya dapat dibagi dengan aset berwujud atau tidak berwujud terkait. Jika nilai wajar setiap aset dalam kelompok tidak dapat ditentukan dengan akurasi yang wajar, pembeli akan memperlakukan kelompok aset tersebut sebagai aset tunggal yang terpisah dari goodwill dalam keadaan tersebut (paragraf 36). Untuk memenuhi persyaratan dasar pengakuan dan penilaian awal aset tidak berwujud, PSAK No. 19 (Revisi 2010) memberikan pedoman untuk aset tidak berwujud yang diciptakan dalam organisasi. Proses penciptaan aset tidak berwujud dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap riset atau riset dan tahap pengembangan, sesuai PSAK No.19 (Revisi 2010), paragraf 51. Merek, daftar pelanggan yang dikembangkan secara internal, dan hal lain yang sejenis. alam tidak boleh diakui sebagai aset tidak berwujud, menurut PSAK No.19 (Revisi 2010), yang menyatakan hal ini dengan tegas di paragraf 62. Menurut Pernyataan ini, biaya yang terkait dengan pendirian bisnis secara keseluruhan setara dengan biaya yang terkait dengan pembuatan merek , daftar klien yang dibuat

secara internal, dan item serupa yang sifatnya serupa. Konsekuensinya, barang-barang tersebut tidak dianggap sebagai aset tidak berwujud (Panggabean, 2013).

5.3 Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tak Berwujud

Pengukuran setelah pengakuan aset tak berwujud adalah proses menentukan nilai wajar dari aset tak berwujud setelah aset tersebut telah diakui pertama kali dalam laporan keuangan. Aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang jelas, seperti hak atas merek, hak cipta, atau hak paten. Pengukuran setelah pengakuan aset tak berwujud dilakukan untuk menentukan nilai wajar aset tersebut pada saat dilaporkan dalam laporan keuangan. Nilai wajar ini kemudian digunakan untuk menentukan besarnya amortisasi yang akan dibebankan pada setiap periode laporan keuangan. Pengukuran setelah pengakuan aset tak berwujud harus memenuhi prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip materialitas, relevansi, dan keandalan. Aset tak berwujud harus diukur pada nilai wajar yang dapat diukur dengan andal dan relevan. Untuk menentukan nilai wajar aset tak berwujud, dapat digunakan berbagai metode, seperti metode biaya, metode arus kas yang diharapkan, atau metode pasar. Pilihan metode yang tepat tergantung pada karakteristik aset tak berwujud yang akan diukur dan informasi yang tersedia. Entitas disyaratkan oleh PSAK No.19 (Revisi 2010) untuk memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi mereka. Semua aset lain dalam kelompok ditangani dengan menggunakan metodologi yang sama jika aset tidak berwujud dinilai menggunakan model revaluasi, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Menurut prinsip pencocokan biaya dengan pendapatan, biaya aset tidak berwujud harus dialokasikan

sesuai dengan kerangka waktu di mana aset tersebut diantisipasi untuk menghasilkan manfaat. Menurut PSAK No.19 (Revisi 2010), yang mengatur amortisasi aset tidak berwujud, jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud didistribusikan secara sistematis berdasarkan penilaian terbaik dari masa manfaatnya. Entitas menentukan apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud dibatasi atau tidak terbatas berdasarkan PSAK No.19 (Revisi 2010), paragraf 88, dan, jika terbatas, lamanya waktu atau kuantitas produksi atau unit serupa yang diproduksi selama masa manfaat tersebut. Kehidupan. Ketika mengestimasi masa manfaat suatu aset tidak berwujud, sejumlah faktor harus diperhitungkan, termasuk: (a) estimasi tentang bagaimana aset tersebut akan digunakan oleh entitas dan keefektifan tim manajemen lainnya; (b) siklus hidup produk yang umum untuk aset dan informasi yang beredar tentang taksiran masa manfaat dari aset sebanding yang digunakan dengan cara yang sama; (c) teknis, teknologi, atau jenis keusangan lainnya; (d) stabilitas industri di mana perangkat lunak Komputer, seperti banyak aset tidak berwujud lainnya, rentan terhadap keusangan teknis karena kemajuan teknologi yang pesat. Mengingat hal ini, masa manfaat aset tidak

biasanya singkat. Seiring bertambahnya masa manfaat aset, estimasi masa manfaat aset tersebut cenderung menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, PSAK No. 19 (Revisi 2010), paragraf 104, mengatur bahwa jangka waktu dan cara amortisasi aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir tahun buku. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud tidak boleh melebihi periode yang dicakup oleh hak hukum, kecuali: hak hukum dapat diperbarui; dan terdapat bukti yang mendukung bahwa pembaruan masa manfaat tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Hal ini benar jika pengendalian atas manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud diperoleh

melalui hak hukum yang diberikan untuk suatu periode tertentu. Ada sejumlah faktor yang dapat menunjukkan apakah suatu hak hukum akan diperpanjang atau tidak, termasuk biaya pembaruan dan manfaat keuangan masa depan yang diharapkan bagi entitas. Ada juga bukti bahwa persyaratan perpanjangan, jika ada, akan dipenuhi. Pendekatan amortisasi harus memperhitungkan pola konsumsi manfaat ekonomi perusahaan. Pendekatan garis lurus harus diterapkan jika pola tidak dapat diidentifikasi secara konsisten. Dalam kebanyakan kasus, amortisasi dianggap sebagai beban. Namun, ada situasi ketika korporasi menggunakan manfaat ekonomi yang terkandung dalam aset untuk mengembangkan aset baru dan tidak menimbulkan biaya. Dalam skenario ini, biaya amortisasi dicatat dalam jumlah tercatat sebagai bagian dari biaya perolehan aset lain. Nilai tercatat persediaan, misalnya, memperhitungkan amortisasi aset tidak berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Nilai sisa aset tidak berwujud harus dianggap nol kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset pada akhir masa manfaatnya atau terdapat pasar aktif untuk aset dimana nilai sisa aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga saat ini di pasar dan kemungkinan pasar akan tetap aktif pada akhir masa manfaat aset. Ketika aset dijual atau ketika tidak ada manfaat lebih lanjut yang diharapkan dari penggunaan dan pelepasannya, aset tidak berwujud harus dihapus dari neraca agar terus dicatat. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset tidak berwujud dihitung dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan hasil bersih dari penjualan, dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi. (Panggabean, 2013)

5.4 Pengungkapan Aset Takberwujud

Pengungkapan aset takberwujud adalah proses mengungkapkan informasi tentang aset takberwujud yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset takberwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak paten, merek dagang, atau reputasi perusahaan. Informasi tentang aset takberwujud ini biasanya disajikan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai bagian dari pengungkapan aset. Pengungkapan aset takberwujud ini penting karena aset takberwujud dapat memiliki nilai yang signifikan bagi perusahaan. Informasi tentang aset takberwujud yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya memahami nilai dan risiko yang terkait dengan aset takberwujud tersebut. Standar akuntansi keuangan internasional (International Financial Reporting Standards, IFRS) mengatur tentang cara mengungkapkan aset takberwujud dalam laporan keuangan perusahaan. Menurut standar ini, aset takberwujud harus diakui dalam laporan keuangan perusahaan jika dan hanya jika aset tersebut memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi tentang aset takberwujud harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan perusahaan agar dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan.

Menurut PSAK No. 19 (Revisi 2010), paragraf 119, laporan keuangan diharuskan untuk membuat pengungkapan berikut untuk setiap kelompok aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya, termasuk nama merek, perangkat lunak komputer, lisensi dan waralaba, hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual, resep, formula model, desain, dan prototipe: (i) penambahan aset tidak berwujud yang memiliki OC'd; (ii) pengurangan aset tidak

berwujud yang telah OC'd; (iii) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (dikombinasikan dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan (e) unsur-unsur dalam laporan keuangan yang mengandung amortisasi aset tidak berwujud. (Panggabean, 2013)

DAFTAR PUSTAKA

- Panggabean, R. R. 2013. Isu Penyatuan Akuntansi Atas Aset Tak Berwujud. *Binus Business Review*, 4(2), 821–833. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i2.1398>
- Trisnajuna, Made, S. 2015. Pengaruh Aset Tidak Berwujud Dan Biaya Penelitian Dan Pengembangan Terhadap Nilai Pasar Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 888–915.

BAB 6

AKUNTANSI SUMBER DAYA ALAM

Oleh Anna Sofia Atichasari

6.1 Tinjauan Industri Pertambangan dan Perannya Bagi Perekonomian Global

Sektor pertambangan memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan memasok sumber daya dan bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan berbagai barang dan jasa. Mineral, logam, dan sumber daya alam lainnya diekstraksi, diproses, dan dijual di sektor ini. Batubara, emas, perak, tembaga, bijih besi, dan bauksit adalah beberapa mineral dan logam terpenting yang ditambang.

Sektor pertambangan sangat penting untuk mendorong ekspansi dan pembangunan ekonomi. Dengan mempekerjakan personel dan menyediakan barang dan jasa untuk operasi pertambangan, ini menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan uang baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga membantu dalam penciptaan infrastruktur dan penyampaian layanan sosial seperti perawatan kesehatan dan pendidikan.

PDB di beberapa negara secara signifikan dipengaruhi oleh industri pertambangan. Sumber utama pendapatan dan perolehan devisa di negara-negara tertentu adalah pertambangan. Selain itu, ini mendorong pertumbuhan sektor lain termasuk manufaktur, konstruksi, dan energi. Jutaan orang telah terangkat dari kemiskinan berkat industri pertambangan, yang telah menjadi kontributor penting bagi keberhasilan ekonomi banyak negara berkembang. Namun, sektor pertambangan juga memiliki kesulitan yang unik, seperti

dampak sosial dan lingkungan. Lingkungan dan ekosistem dapat hancur selama penambangan dan pemrosesan mineral dan logam. Industri pertambangan juga berkontribusi terhadap pembuangan polutan lain, seperti gas rumah kaca, yang dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Banyak perusahaan pertambangan telah membuat kebijakan untuk mengurangi efek negatif mereka terhadap lingkungan dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

Karena sifat kegiatannya yang khas, operasi penambangan memiliki persyaratan khusus untuk pelaporan dan analisis keuangan. Investasi jangka panjang dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan adalah hal yang membuat bisnis pertambangan unik. Selain itu, sektor pertambangan dicirikan oleh ketidakstabilan harga yang substansial, sehingga sulit untuk memproyeksikan pendapatan dan arus kas di masa depan.

Akuntansi cadangan dan sumber daya mineral merupakan salah satu persyaratan utama pelaporan keuangan untuk operasi penambangan. Jumlah mineral yang diproyeksikan dapat diekstraksi secara menguntungkan dari properti pertambangan dikenal sebagai cadangan dan sumber daya mineral.

Biaya akuisisi dilacak melalui akuntansi cadangan dan sumber daya alam dengan mengkapitalisasinya di neraca dan secara bertahap serta membebankannya saat sumber daya habis. Dalam konteks akuntansi, sumber daya alam mencakup baik pohon yang dibudidayakan untuk tujuan komersial maupun yang ditemukan di cadangan bawah permukaan, seperti mineral, minyak, dan gas. Aset sumber daya alam dibedakan dari aset tetap lainnya yang dapat disusutkan di neraca sebagai aset berumur panjang karena hanya dapat digantikan oleh proses alami dan diambil secara fisik selama operasi perusahaan.

6.2 Aset Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ditemukan dalam deposit bawah permukaan, seperti minyak, gas, dan mineral, serta aset berupa kayu atau pohon yang dibudidayakan untuk tujuan komersial. Harga perolehan aset sumber daya alam dikapitalisasi dalam neraca yang direpresentasikan sebagai biaya

Perusahaan pertambangan juga perlu mempertimbangkan dampak volatilitas harga terhadap kinerja keuangan mereka. Harga mineral dan logam dapat berfluktuasi secara signifikan, yang dapat berdampak besar pada kinerja keuangan perusahaan pertambangan. Volatilitas ini dapat mempersulit perusahaan pertambangan untuk memperkirakan pendapatan dan arus kas di masa depan. Untuk mengurangi dampak ketidakstabilan harga, perusahaan pertambangan dapat menggunakan strategi lindung nilai seperti kontrak penjualan berjangka, opsi, dan kontrak berjangka.

Kesimpulannya, operasi penambangan memiliki persyaratan pelaporan dan analisis keuangan yang unik karena sifat operasinya yang unik. Industri pertambangan dicirikan oleh investasi jangka panjang, volatilitas harga yang signifikan, dan persyaratan akuntansi unik untuk cadangan dan sumber daya mineral, biaya penambangan, dan pengakuan pendapatan. Persyaratan unik ini dapat mempersulit perusahaan pertambangan untuk memperkirakan pendapatan dan arus kas di masa mendatang, dan dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan pertambangan dapat menggunakan pemodelan keuangan, manajemen risiko, dan strategi lindung nilai untuk mengelola kinerja keuangan mereka.

6.3 Pencatatan Harga Perolehan Sumber Daya Alam

Harga beli ditambah semua biaya yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan diperhitungkan saat menentukan sambil memperkirakan biaya aset tetap lainnya, biaya aset sumber daya alam.

Berikut ini adalah beberapa biaya yang dihadapi bisnis saat memperoleh dan menyiapkan aset sumber daya alam:

Harga beli adalah jumlah yang dibayarkan oleh korporasi untuk memperoleh izin usaha pertambangan (IUP) atau hak atas tanah. Sedangkan eksplorasi yaitu jumlah yang dikeluarkan bisnis untuk eksplorasi guna menemukan aset sumber daya alam

Pengeluaran yang dikeluarkan oleh korporasi untuk mendirikan infrastruktur pendukung di sekitar lokasi sumber daya alam dikenal sebagai biaya pengembangan. Biaya untuk mengebor, mengekstraksi, dan membangun terowongan dan sumur sudah termasuk dalam hal ini.

5.4 Deplesi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam, biasanya disebut sebagai aset yang dapat dikonsumsi, habis digunakan karena unit fisik aktual yang mewakilinya diperdagangkan dan dijual. Contoh praktik yang mengarah pada deplesi sumber daya alam antara lain ekstraksi minyak dan gas, penebangan pohon, penambangan batu bara, belerang, bijih besi, tembaga, dan perak. Pengeluaran untuk "menghabiskan" sumber daya adalah biaya deplesi.

Metode penyusutan unit produksi dimodifikasi untuk perhitungan biaya deplesi. Memperkirakan jumlah sumber daya yang secara ekonomis dapat dikeluarkan dari tanah bisa terbilang merupakan masalah yang paling menantang dalam perhitungan beban deplesi. Perkiraan biasanya dibuat dengan

bantuan ahli geologi, insinyur pertambangan, atau profesional lainnya, dan ini dapat terus direvisi ketika sumber daya dieksploitasi atau dipindahkan.

Untuk menentukan seluruh biaya yang dapat dihapuskan, biaya penambangan termasuk penggalan, pembuatan terowongan, dan pembangunan jalan harus dikapitalisasi dan ditambahkan ke biaya aset. Biaya ini biasanya dikeluarkan sebelum dimulainya operasi reguler.

6.5 Perhitungan Deplesi Aset Sumber Daya Alam

Distribusi sumber daya alam secara sistematis selama masa manfaatnya dikenal sebagai deplesi. Oleh karena itu, jika alokasi biaya untuk aset tetap berwujud selain sumber daya alam disebut penyusutan, maka alokasi biaya untuk aset sumber daya alam disebut deplesi.

Perusahaan biasanya menggunakan teknik unit produksi untuk mengukur deplesi karena deplesi dihasilkan dari proses ekstraksi unit yang dilakukan sepanjang tahun.

Biaya Deplesi per Unit = $\frac{\text{Biaya Total} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Unit yang Tersedia}}$

Jurnal beban deplesi yang dicatat setiap tahun oleh perusahaan sebagai berikut:

Beban Deplesi	xxx
Akumulasi Deplesi	xxx

Ilustrasi aset sumber daya alam dicatat sebagai berikut :

Perhitungan nilai pembelian dan biaya deplesi aset sumber daya alam (SDA), serta penjurnalan dan pencatatannya di neraca dan laba rugi, semuanya ditunjukkan dalam contoh berikut.

Asumsikan hal berikut untuk menunjukkan penghitungan biaya deplesi: Untuk \$5.500.000, sebidang tanah dengan sumber daya mineral dibeli. Nilai sisa tanah diperkirakan \$250.000 setelah semua cadangan mineral diambil. Satu juta ton diperkirakan berada di gudang sumber daya alamnya. Menurut perhitungan berikut, biaya deplesi unit tahun pertama dan biaya deplesi keseluruhan didasarkan pada 80.000 ton ekstraksi mineral.

Biaya deplesi per ton:

$$(\$5.500.000 - \$250.000) / 1.000.000 = \$5,25$$

Biaya deplesi untuk tahun pertama:

$$80.000 \text{ ton} \times \$5,25 = \$420.000$$

Ayat jurnal yang harus dibuat untuk mencatat kejadian ini adalah:

Cadangan Mineral	5.500.000
Kas	5.500.000
Beban Deplesi	420.000
Akumulasi Deplesi (atau Cadangan Mineral)	420.000

Seluruh jumlah 420.000 akan diperhitungkan sebagai bagian dari harga pokok penjualan jika 80.000 ton cadangan mineral yang digali dijual pada tahun berjalan. Jika hanya 60.000 yang terjual, neraca menunjukkan bahwa \$105.000 termasuk dalam persediaan penutup. Masuk akal untuk mengakui penyusutan aset tersebut berdasarkan keluaran yang konsisten dengan biaya yang akan diakui untuk sumber daya alam itu sendiri jika bangunan dan perbaikan dilakukan sehubungan dengan pengalihan sumber daya alam dan manfaat dibatasi oleh durasi proyek. Pertimbangkan struktur yang harganya \$250.000. Umur manfaatnya diperkirakan akan berakhir ketika 1.000.000 ton sumber daya alam habis. Dalam

keadaan seperti itu, biaya penyusutan yang dilaporkan untuk setiap unit harus disertai dengan biaya penyusutan sebesar \$0,25 ($\$250.000/1.000.000$) (ton). Biaya perbaikan tersebut harus dibagi berdasarkan unit yang akan dipindahkan selama perbaikan, atau berdasarkan waktu, mana yang lebih tepat, jika peningkatan membawa keuntungan yang diantisipasi bertahan sebelum habisnya sumber daya alam.

6.6 Estimasi Variabel Untuk Alokasi Biaya Yang Telah Berubah

Karena banyak variabel yang harus dinilai, tidak mungkin untuk mengalokasikan biaya aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode secara akurat pada saat perolehan. Biaya aset adalah satu-satunya komponen yang digunakan untuk menghitung biaya periodik untuk amortisasi, depresiasi, atau depleksi, dan didasarkan pada data historis. Penting untuk mengevaluasi elemen tambahan, seperti nilai residu, masa pakai atau produksi yang dapat digunakan, pola penggunaan, atau manfaat. Bagaimana estimasi ini diperbarui dalam akun karena berubah dari waktu ke waktu adalah masalah yang sering dihadapi akuntan.

Berbeda dengan penyesuaian untuk periode sebelumnya, perubahan estimasi disajikan untuk periode saat ini dan periode berikutnya. Penyesuaian semacam ini dilakukan untuk memperhitungkan nilai residu dan modifikasi pada masa pakai yang dapat digunakan. Perubahan metode penyusutan, di sisi lain, yang didasarkan pada pola penggunaan yang diharapkan diperbarui adalah perubahan prinsip akuntansi dan harus dipertanggungjawabkan dengan menentukan berapa penyusutan yang dilaporkan pada periode sebelumnya akan berbeda jika metode baru diterapkan dan digunakan selama ini.

6.7 Perubahan dalam Masa Manfaat

Asumsikan bahwa sebuah bisnis membelanjakan \$50.000 untuk peralatan dengan prediksi masa manfaat 10 tahun untuk mendemonstrasikan proses bagaimana perubahan masa manfaat memengaruhi alokasi harga penutupan aktivasi. Depresiasi tahunan, dihitung dengan menggunakan pendekatan garis lurus tanpa nilai sisa, adalah \$5.000. Setelah empat tahun, akumulasi penyusutan menjadi \$20.000 dan nilai buku menjadi \$30.000. Tinjauan terhadap masa pakai aset pada awal tahun kelima mengungkapkan bahwa aset tersebut memiliki sisa empat tahun.

Untuk mencerminkan perubahan tersebut, penyesuaian harus dilakukan untuk tahun kelima dan tahun-tahun berikutnya. Dengan membagi nilai buku dengan empat tahun sisa masa manfaat, biaya penyusutan tahunan yang baru ditentukan. Untuk tahun kelima sampai kedelapan, biaya penyusutan adalah \$7.500 ($\$30.000/4 = \7.500).

Tahun	Perhitungan	Jumlah Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
1	$\$50.000/10$	\$ 5.000	\$ 5.000
2	$\$50.000/10$	\$ 5.000	\$ 10.000
3	$\$50.000/10$	\$ 5.000	\$ 15.000
4	$\$50.000/10$	\$ 5.000	\$ 20.000
5	$(\$5.000 - \$20.000)/4$	\$ 7.500	\$ 27.500
6	$(\$5.000 - \$20.000)/4$	\$ 7.500	\$ 35.000
7	$(\$5.000 - \$20.000)/4$	\$ 7.500	\$ 42.500
8	$(\$5.000 - \$20.000)/4$	\$ 7.500	\$ 50.000
		\$ 50.000	

6.8 Perubahan dalam Estimasi Unit Produksi

Estimasi unit output yang dapat ditemukan sebagai hasil dari penemuan baru, peningkatan teknik ekstraksi, atau perubahan harga jual yang menyarankan perubahan jumlah unit yang menguntungkan untuk diekstraksi adalah perubahan lain dalam estimasi sumber daya alam. Sisa biaya sumber daya dibagi dengan jumlah unit yang dapat diselamatkan yang diantisipasi untuk sampai pada tingkat penipisan yang direvisi.

Ambil ilustrasi sebelumnya sebagai contoh. Sebidang tanah dengan perkiraan nilai sisa bersih \$250.000 dibeli seharga \$5.500.000. Satu juta ton diperkirakan berada di deposit mineral. Biaya deplesi untuk tahun pertama ketika 80.000 ton mineral ditambang adalah \$420.000 sesuai dengan kondisi \$5,25 per tingkat deplesi/ton. Asumsikan bahwa 100.000 ton bijih besi diekstraksi pada tahun kedua, tetapi ketika pembukuan ditutup pada akhir tahun kedua, 950.000 ton cadangan mineral yang diproyeksikan masih ada sebagai hasil penilaian.

Tingkat deplesi untuk tahun kedua adalah:

Harga perolehan cadangan mineral pada awal tahun kedua:

Biaya perolehan sumber daya yang bisa didepleksi	\$5.250.000
-/- : Beban deplesi tahun ke-1	420.000
Saldo harga perolehan setelah deplesi	\$4.830.000

Estimasi cadangan mineral pada awal tahun kedua:

Jumlah yang dieksploitasi tahun ke-2	100.000
Estimasi cadangan mineral akhir tahun kedua	950.000
Jumlah cadangan mineral pada awal tahun ke-2	1.050.000

Biaya deplesi per ton untuk tahun ke-2 ($\$4.830.000 / 1.050.000$)
= \$4.60

Beban deplesi tahun ke-2: ($100.000 \times \$4.60$) = \$460.000

Pertumbuhan cadangan mineral terkadang dapat dikaitkan dengan peningkatan investasi dalam pengembangan aset. Biaya cadangan mineral dibagi dengan jumlah mineral yang dapat ditambang harus dinaikkan dalam situasi ini. Dengan menggunakan kasus sebelumnya sebagai contoh, jika \$525.000 lebih banyak dihabiskan, tingkat deplesi dan biaya deplesi akan dihitung secara berbeda.

Harga perolehan yang dialokasikan pada cadangan mineral pada awal tahun kedua

Harga perolehan sumber daya yang bisa didepleksi	\$5.250.000
+ / + : Biaya tambahan yang muncul tahun ke-2	525.000

Total	\$5.775.000
-------	-------------

- / - : Beban deplesi tahun ke 1	420.000
Jumlah yang akan didepleksi	\$5.355.000

Estimasi cadangan mineral awal tahun	1.050.000
--------------------------------------	-----------

Tarif deplesi per ton tahun ke-2: $\$5.355.000 / 1.050.000 = \5.10

Beban deplesi tahun ke-2 : $100.000 \times \$5.10 = \510.000

Akuntansi melibatkan beberapa pertanyaan. Langkah-langkah yang diuraikan dalam bagian ini dimaksudkan untuk menghindari penyajian kembali laba tahun sebelumnya. Hanya ketika kesalahan muncul dan tidak setiap kali estimasi berubah, penyesuaian ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan.

6.9 Akuisisi Aset Sumber Daya Alam

Vibes Corp. membeli tambang batu bara sejumlah 15 miliar. Adapun 3 miliar untuk biaya eksplorasi dan biaya pengembangan 7 miliar.

Pencatatan untuk transaksi diatas sebagai berikut :

Tambang Batu Bara 25 miliar

Kas 25 miliar

Biaya pembelian peralatan untuk keperluan pertambangan oleh PT Vibes tidak dikapitalisasi ke aset sumber daya alam; melainkan dikurangkan dari akun peralatan daripada akun penambangan batubara.

6.10 Nilai Aset Sumber Daya Alam Yang Tersisa

PT Vibes membeli tanah yang didalamnya memiliki kandungan batubara. Dengan operasi penambangan perusahaan yang dilakukan secara terus menerus, tambang menjadi semakin langka. Sekarang tambang telah diperbaiki, PT Vibes melakukan penjualan tanah yang dimaksud senilai \$1,5 miliar, tetapi tidak ada yang bersedia membayar sebesar itu untuk membelinya. Biaya operasi rehabilitasi mencapai Rp 200 juta, sehingga nilai sisa lahan menjadi Rp 1,3 miliar

Menghitung Tarif Deplesi

Pembelian tanah yang mengandung batu bara yang dibayar Welfin Tambang, sebesar \$5 miliar. Biaya untuk eksplorasi dan pengembangan masing-masing berjumlah \$1,5 miliar dan \$3 miliar. Lahan tersebut masih bernilai \$500 juta, tetapi rehabilitasi akan menelan biaya tambahan \$100 juta.

Jika 20.000 ton batubara diperkirakan ada di properti tersebut, tingkat deplesinya sama dengan:

$$(5 \text{ miliar} + 1,5 \text{ miliar} + 3 \text{ miliar} - (500 \text{ juta} - 100 \text{ juta})) / 20 \text{ ribu ton} = 455 \text{ ribu per ton}$$

Beban deplesi di laporan keuangan

Dalam contoh PT Welfin Tambang di atas, jika perusahaan menambang dan menjual 5.000 ton batubara pada tahun pertama, biaya deplesi untuk tahun tersebut adalah $5.000 \text{ ton} \times 455.000$, atau 2,275 miliar.

Pencatatan dalam transaksi ini yaitu:

Beban Deplesi	2,275 miliar
Akumulasi Deplesi	2,275 miliar

Pada neraca perusahaan, aset tersebut akan disajikan sebagai berikut:

Tambang Batu Bara	9,5 miliar
Akumulasi Deplesi	2,275 miliar
Aset Bersih	7,225 miliar

Beban deplesi otomatis masuk dalam harga pokok penjualan karena merupakan biaya produksi pada laporan laba rugi (HPP).

Secara teori, akuntansi untuk aset sumber daya alam sama dengan akuntansi untuk aset tetap lainnya; namun, karena karakteristiknya yang unik, aset sumber daya alam ditangani secara berbeda.

Fakta bahwa Salah satu ciri aset sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh aset tetap fisik maupun aset tetap tidak berwujud adalah bahwa aset yang dieksploitasi selama operasi perusahaan dan hanya dapat digantikan oleh proses alam.

Hal ini tidak diragukan lagi berbeda dengan aset tetap berwujud lainnya, seperti kendaraan atau peralatan pabrik, yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan secara berkala untuk memperpanjang usia ekonomis dan masa pakainya.

Tidak tepat menghitung biaya deplesi per periode dengan menggunakan metode garis lurus karena karakteristik khusus dari aset sumber daya alam tersebut. Metode unit

produksi paling cocok untuk aset yang nilainya berkurang dengan eksploitasi.

Anda dapat membaca PSAK 64 tentang pertambangan sumber daya alam mineral atau PSAK 69 terkait pertanian untuk mempelajari lebih lanjut tentang akuntansi sumber daya alam, khususnya persyaratan yang berlaku di Indonesia.

6.11 Akuntansi Tanah

Menurut fungsi atau tujuan penggunaannya dalam suatu badan usaha, tanah dapat diklasifikasikan dan disajikan dalam pelaporan akuntansi dengan cara sebagai berikut.:

- a. Aset tetap
- b. Barang dagang: Perusahaan real estat tanah yang mapan.
- c. Tanah mentah yang digunakan oleh perusahaan real estate sebagai input produksi.
- d. Investasi: membeli tanah untuk digunakan sebagai real estat.
- e. Aset tambahan, seperti tanah yang disisihkan untuk pembangunan gedung manufaktur.
- f. Aset tetap tanah dengan hak sewa adalah yang diperoleh melalui sewa.

6.12 Hak atas Tanah

Sejalan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa jenis hak atas tanah:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Bangunan
- c. Hak Guna Usaha
- d. Hak Pakai

Derajat tertinggi hak atas tanah, yang dikenal sebagai hak milik, tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Badan Usaha

tidak diperbolehkan memperoleh hak milik berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Entitas diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menggunakan HGB, HGU, dan HP yang diperolehnya, namun Selama semua peraturan dan larangan dipatuhi, periode ini dapat terus diperpanjang.. Tanah yang dibeli siap pakai atau dibeli dan kemudian dikembangkan sampai siap digunakan dalam kegiatan entitas dengan manfaat ekonomi lebih dari satu tahun diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai HGB, HGU, dan HP dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan dalam operasi reguler entitas.

6.13 Biaya Perolehan

Hak atas tanah berupa HGB, HGU, dan biaya perolehan HP diklasifikasikan sebagai aset tetap. Semua biaya yang dikeluarkan sejak tanah diperoleh pertama kali sampai siap digunakan untuk itu sudah termasuk dalam biaya perolehan aset tetap tanah:

- a. Tanaman, infrastruktur, dan bangunan di atas properti yang harus dibeli dan nantinya perlu dibongkar sudah termasuk dalam harga transaksi pembelian.
- b. Pembuatan lahan atau biaya pembangunan, jika lahan baru dibuat. Reklamasi lahan pesisir adalah salah satu contohnya.
- c. Biaya relokasi dan kompensasi penghuni, serta biaya pembelian tanah baru. Misalnya, saat menggusur warga dari rumahnya untuk pembangunan proyek.
- d. Biaya administrasi untuk memproses komisi perantara, biaya notaris, pajak penjualan, dan biaya untuk memproses sertifikat tanah.
- e. Biaya pinjaman sesuai dengan standar untuk mengkapitalisasi biaya pinjaman.
- f. Harga tanah berkembang.

Pengeluaran setelah tanah diperoleh yang dapat mendongkrak kinerjanya atau memperpanjang umur ekonominya dapat ditambahkan pada harga beli tanah tersebut guna meningkatkan manfaat ekonominya. Misalnya, harga penimbunan dan peninggian tanah yang sering banjir, harga pembuatan tanggul untuk menahan erosi di wilayah pesisir, atau harga pemasangan penyangga beton di lokasi tebing untuk menahan longsor.

Hak atas tanah dalam bentuk HGB, HGU, dan HP tidak dibatasi umur ekonomisnya sehingga tidak didevaluasi, kecuali terdapat bukti sebaliknya yang menunjukkan bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah dapat dijamin atau tidak dapat dijamin.

Berikut ini adalah beberapa contoh di mana kehidupan ekonomi tanah dibatasi:

- a. Kegiatan utama entitas tidak lagi sesuai dengan sifat tanahnya ketika kegiatan tersebut selesai;
- b. Manajemen memperkirakan bahwa kondisi kualitas tanah tidak lagi dapat diterima untuk digunakan dalam operasi tersebut dalam jangka waktu tertentu.
- c. Kebijakan pemerintah yang akan menggunakan tanah untuk kepentingan umum dengan cara yang tidak memungkinkan perpanjangan hak atas tanah, seperti tanah yang digunakan untuk operasi utama atau proyek terletak di daerah terpencil dan tanah disusutkan berdasarkan perkiraan panjang operasi utama atau proyek

6.14 Memperoleh Tanah dan Bangunan Bersama

Meskipun tanah dan bangunan tersebut dibeli sebagai satu kesatuan, PSAK 16 menyatakan bahwa merupakan aset yang berdiri sendiri. Hal ini agar tanah, yang umumnya memiliki umur tak terbatas dan tidak terdepresiasi, dapat

disamakan dengan struktur, yang terdepresiasi sebagai aset tetap.

Ilustrasi Pengadaan Tanah

Entitas A membayar kas untuk aset yang terdiri dari tanah dan bangunan pada awal tahun seharga Rp. 960.000.000. Pada saat akuisisi, diakui bahwa nilai wajar tanah tersebut adalah Rp. 700.000.000 dan nilai wajar bangunan tersebut adalah Rp. 500.000.000. Tanpa nilai sisa, umur fungsional bangunan diperkirakan 10 tahun. Buatlah jurnal untuk tahun pertama transaksi di atas.

Solusi :

PSAK 16 menyatakan bahwa meskipun tanah dan bangunan dibeli sebagai satu kesatuan, keduanya merupakan aset yang terpisah.

Harga perolehan yang dialokasikan ke tanah = $\frac{7}{12} \times \text{Rp}960.000.000 = \text{Rp}560.000.000$

Harga perolehan yang dialokasikan ke bangunan = $\frac{5}{12} \times \text{Rp}960.000.000 = \text{Rp}400.000.000$

*) $\frac{7}{12} = \text{Rp}700.000.000 / (\text{Rp}500.000.000 + \text{Rp}700.000.000)$

**) $\frac{5}{12} = \text{Rp}400.000.000 / (\text{Rp}500.000.000 + \text{Rp}700.000.000)$

Jurnal di awal tahun:

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Tanah	560.000.000	
Bangunan	400.000.000	
Kas		960.000.000

Jurnal di akhir tahun:

Mencatat beban depresiasi bangunan

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Beban Depresiasi – Bangunan (1/10 x 400 juta)	40.000.000	
Akumulasi Depresiasi - Bangunan		40.000.000

- Tanah dalam kasus di atas tidak didepresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. 2018. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.16: Aset Tetap. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Donald E. Keiso, Jerry J Weyggand and Terry D. Warfield. 2017. Intermediate Accounting IFRS Edition, 3th Edition. United States of America: Jhon Wiley & Sons, Inc
- Stice, Earl K, James D Stice dan Fred Skousen, 2009 Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi 16, Buku 2. Edisi Bahasa Indonesia. Terjemah Oleh Ali Akbar. PT. Salemba Empat: Jakarta

BAB 7

AKUNTANSI LIABILITAS LANCAR

Oleh Ricky

7.1 Pendahuluan

Kita telah mempelajari bahwa liabilitas didefinisikan sebagai "klaim kreditur atas total aset" dan sebagai "utang dan kewajiban yang ada". Perusahaan harus menyelesaikan atau membayar klaim, utang, dan kewajiban ini pada suatu waktu di masa depan dengan aset ataupun jasa yang dimilikinya. Tanggal jatuh tempo di masa depan merupakan fitur signifikan dari liabilitas.

Liabilitas lancar (kewajiban lancar) adalah utang yang diharapkan akan segera dilunasi dalam jangka waktu satu tahun dan dibayar menggunakan aset lancar. Utang yang tidak memiliki kriteria ini merupakan liabilitas tidak lancar.

Pengguna laporan keuangan tentunya perlu mengetahui apakah liabilitas perusahaan lancar atau tidak lancar. Perusahaan yang mempunyai kewajiban lancar lebih banyak daripada aset lancar seringkali mengalami masalah likuiditas, atau terbatasnya kemampuan membayar utang jangka pendek. Selain itu, stakeholder juga ingin mengetahui jenis kewajiban yang dimiliki perusahaan. Jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, ataupun adanya perintah terkait pembayaran khusus yang telah ditentukan sebelumnya kepada kreditor. Dengan demikian, jumlah dan jenis kewajiban pada perusahaan sangat penting untuk diketahui.

Liabilitas lancar meliputi utang wesel (*notes payable*), utang usaha (*account payable*), pendapatan diterima dimuka (*unearned revenue*), dan beban-beban akrual yang masih harus

dibayar (*accrued expenses*) seperti utang gaji, utang bunga, utang pajak, dan sebagainya.

7.2 Utang Wesel (*Notes Payable*)

Utang wesel adalah suatu bentuk liabilitas yang disertai dengan bukti tertulis secara formal, dalam bentuk wesel atau promes dan akan dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Utang wesel dengan jangka waktu tidak lebih dari setahun diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Ada dua jenis wesel yaitu, wesel berbunga dan wesel tidak berbunga.

Contoh, Bank ABC memberikan pinjaman kepada Smith Co. sebesar \$100.000 pada tanggal 1 September 2021. Untuk itu, bank meminta kepada Smith Co. untuk menandatangani sebuah wesel berbunga 12% dan jangka waktu 4 bulan. ***Diminta:*** Buatlah jurnal yang dibuat Smith Co. pada tanggal 1 September 2021, jurnal penyesuaian 31 Desember 2021 (asumsikan perusahaan tidak melakukan penyesuaian bulanan) dan jurnal pada saat jatuh tempo.

Maka untuk perhitungan dan ayat jurnal atas transaksi di atas sebagai berikut:

1 September 2021: **pada saat wesel diterbitkan*

Kas	\$100.000	
Utang Wesel		\$100.000

31 Desember 2021: **penyesuaian atas bunga wesel – 4 bulan*

Beban Bunga	\$ 4.000	
Utang Bunga		\$ 4.000

1 Januari 2022: **pada saat pelunasan utang wesel – tanpa jurnal pembalik*

Utang Wesel	\$100.000	
Utang Bunga	\$ 4.000	
Kas		\$104.000

7.3 Utang Pajak (*Tax Payable*)

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Ada beberapa jenis pajak yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Pajak Penghasilan, dan lainnya. Semua jenis pajak tersebut dipungut dan disetor ke kas negara.

Contoh, Tanggal 25 September 2022, PT XYZ menjual barang dagang seharga \$100.000. Atas penjualan ini, PT XYZ memungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli menjadi \$111.000. **Diminta:** Buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT XYZ.

Maka untuk perhitungan dan ayat jurnal atas transaksi di atas sebagai berikut:

25 September 2022:

Kas	\$111.000	
Penjualan		\$100.000
PPN Keluaran		\$ 11.000

7.4 Pendapatan Diterima Dimuka (*Unearned Revenue*)

Pendapatan diterima dimuka (*unearned revenue*) adalah penerimaan atas kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli, dan harus diperlakukan sebagai utang karena penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa di waktu yang akan datang, seperti tiket pesawat, langganan Prabayar bulanan, hotel, dan lainnya.

Contoh, Tanggal 1 Desember 2021, CV Sejahtera menerima pesanan 500 buah kursi kuliah dari klien seharga

\$100 perbuah. Pada tanggal tersebut CV Serayu menerima pembayaran uang muka sebesar \$25.000.

Diminta:

- Buatlah jurnal yang dicatat oleh CV Serayu pada tanggal 1 Desember 2021.
- Apabila pada tanggal 31 Desember, CV Sejahtera telah mengirimkan 100 buah kursi dalam penyerahan tahap pertama, buatlah jurnal yang diperlukan.

Maka perhitungan dan ayat jurnal atas transaksi di atas sebagai berikut:

1 Desember 2021: **pada saat penerimaan pembayaran dimuka*

Kas	\$25.000
Pendapatan Diterima Dimuka	\$25.000

31 Desember 2021: **penyesuaian atas pengiriman 100 buah kursi kepada klien*

Pendapatan Diterima Dimuka	\$10.000
Pendapatan Usaha	\$10.000

Contoh lainnya, Busan IPark (KOR) menjual 10.000 tiket pertandingan musiman football seharga W50.000 untuk lima skedul pertandingan tuan rumah. Ayat jurnal yang dibuat ketika penjualan tiket tersebut, sebagai berikut:

Kas	\$50.000
Pendapatan Diterima Dimuka	\$50.000

Setiap satu skedul pertandingan diselesaikan, maka klub tersebut akan mengakui penerimaan sebelumnya sebagai pendapatan yang telah diterima.

Pendapatan Diterima Dimuka	\$10.000
Pendapatan Usaha	\$10.000

7.5 Beban AkruaI (*Accrued Expenses*) – Beban Gaji (*Salaries and Wages*)

Utang gaji adalah rekening liabilitas lancar yang terkait semua gaji dan upah yang belum dibayarkan perusahaan terhadap para karyawannya. Para manajer, karyawan administrasi, dan karyawan kantor biasanya mendapat gaji dari perusahaan yang jumlahnya tetap. Sedangkan karyawan atau buruh pabrik menerima upah dengan tarif yang dinyatakan dalam per jam, atau satuan lainnya.

Contoh, Biaya gaji yang terjadi pada Hahaha Dept. Store pada bulan Desember 2021 berjumlah Rp420.000.000,- Selain itu, perusahaan juga memberikan fringe benefit (tunjangan asuransi) kepada karyawan, yaitu berupa asuransi kesehatan Rp11.346.800,- asuransi tenaga kerja Rp3.510.700,- dan asuransi dana pensiun Rp7.070.600,- Dalam jumlah ini termasuk pajak penghasilan karyawan sebesar 35.280.000,- **Diminta:** Buatlah jurnal atas data tersebut.

Maka untuk perhitungan dan ayat jurnal atas transaksi di atas sebagai berikut:

Beban Gaji	Rp441.928.100
Utang Asuransi Kesehatan	Rp 11.346.800
Utang Asuransi Tenaga Kerja	Rp 3.510.700
Utang Arusansi Dana Pensiun	Rp 7.070.600
Utang Pajak	Rp 35.280.000
Utang Gaji	Rp384.720.000

7.6 Liabilitas Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Saat Ini (*Current Maturities of Long-Term Debt*)

Perusahaan seringkali memiliki komponen atas liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berjalan. Jumlah tersebut dianggap sebagai kewajiban lancar. Untuk

liabilitas jangka panjang yang akan diakui sebagai kewajiban lancar tidak diperlukan ayat jurnal penyesuaian.

7.7 Kumpulan Soal-soal Latihan

Berikut kumpulan soal-soal latihan pada materi liabilitas lancar yang dapat dipelajari secara mandiri:

Soal 1

Berikut ini transaksi-transaksi yang terjadi pada PT Milenium:

- 1 Mei 21 : Beli peralatan dengan harga Rp45.000.000,- dalam bentuk sebuah wesel 10% jangka waktu 1 tahun.
31 Des 21 : Diakui beban bunga wesel yang terutang.
1 Mei 22 : Dilunasi wesel pada tanggal jatuh tempo.

Diminta: *Buatlah jurnal atas transaksi diatas.*

Soal 2

PT Soni memiliki saldo-saldo rekening yang berkaitan dengan garansi sebagai berikut:

Utang Garansi	Rp 38.000.000,-
Penjualan	Rp1.410.000.000,-
Biaya Garansi	Rp 0,-

Menurut pengalaman tahun-tahun sebelumnya, jumlah biaya garansi rata-rata 8% dari total penjualan. Pada periode ini, perusahaan sudah mengeluarkan kas sebesar Rp117.900.000,- untuk membayar klaim garansi kepada para pelanggan.

Diminta:

- Catatlah biaya garansi periode ini dan kas yang dibayarkan kepada pelanggan dalam jurnal umum.
- Hitunglah saldo akhir rekening utang garansi periode ini.

Soal 3

Berikut ini informasi yang berhubungan dengan gaji dan upah untuk salah satu kantor pemasaran PT Ananda, untuk minggu ke tiga bulan Desember yang berakhir tanggal 21 Desember 2021:

Nama Karyawan	Jam Kerja	Tarif/Jam	PPh	Potongan Lain
Mina	42	180.000	1.530.000	110.000
Jony	47	80.000	560.000	80.000
Lina	40	110.000	720.000	40.000
Rudy	41	160.000	1.370.000	140.000

Jony dan Lina bekerja di kantor, sedangkan Mina dan Rudy bekerja di bagian pemasaran. Semua karyawan dibayar sesuai dengan jam kerja normal (maksimum 40 jam per minggu). Kelebihan dari 40 jam dihitung setengahnya.

Diminta:

- Buatlah daftar gaji dari informasi diatas.
- Catatlah informasi yang berhubungan dengan gaji, dalam jurnal umum.

Buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran bersih kepada karyawan.

Soal 4

Padillio SpA memiliki beberapa transaksi yang terkait dengan utang wesel.

- Jul 1, 2021 Perusahaan meminjam sejumlah dana sebesar \$60,000 dari Fourth National Bank dengan kesepakatan menerbitkan wesel jangka waktu 9 bulan dan bunga 8% pertahun.
- Nov 1, 2021 Perusahaan meminjam sejumlah dana sebesar \$42,000 dari Livingston Bank dengan

kesepakatan menerbitkan wesel jangka waktu 3 bulan dan bunga 7% pertahun.

Des 31, 2021 Menyiapkan ayat jurnal penyesuaian

Feb 1, 2022 Perusahaan membayar utang wesel beserta bunganya kepada Livingston Bank.

Apr 1, 2022 Perusahaan membayar utang wesel beserta bunganya kepada Fourth National Bank.

Diminta: Buatlah ayat jurnal atas transaksi di atas.

Soal 5

Dalam melakukan jasa pembukuan akuntansi untuk usaha kecil, Anda menghadapi situasi berikut yang berkaitan dengan penjualan tunai.

1. Kemer A.S melakukan penjualan dan mencatat pajak pertambahan nilai secara terpisah di mesin kasirnya. Pada tanggal 10 April, total penjualan \$30.000 dan pajak pertambahan nilai \$3.300.
2. Bodrum A.S tidak memisahkan pajak penjualan dan penjualannya. Total uang yang diterima pada 15 April adalah \$10.000, termasuk pajak pertambahan nilai 11%.

Diminta: Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi penjualan dan pajak terkait untuk setiap klien.

Soal 6

Nevin Ltd. menerbitkan majalah olahraga bulanan, Fishing Preview. Berlangganan majalah berharga \$ 18 per tahun. Selama November 2021, Nevin menjual 12.000 langganan dimulai dengan edisi Desember. Nevins menyiapkan laporan keuangan setiap tiga bulan dan mengakui pendapatan langganan pada akhir kuartal. Perusahaan menggunakan akun Pendapatan Diterima Dimuka dan Pendapatan Usaha.

Diminta:

- a) Buatlah ayat jurnal untuk bulan November terkait penjualan langganan tersebut.
- b) Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2021, untuk mengakui pendapatan usaha pada Desember 2021.
- c) Buatlah ayat jurnal penyesuaian pada 31 Maret 2022, untuk mengakui pendapatan usaha pada kuartal pertama di tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso. 2011. Financial Accounting: IFRS, first edition: Wiley.
- Warren, Carl S.; Reeve dan Fess. 2005. Accounting, 21th Edition: Thomson South-Western.
- Jusup, Al Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi: Jilid 1. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Jusup, Al Haryono. 2011. Dasar-Dasar Akuntansi: Jilid 2. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Hery. 2017. Akuntansi Dasar 1 dan 2. 2013. Grasindo

BAB 8

AKUNTANSI EKUITAS

Oleh Rini Ridhawati

8.1 Pendahuluan

Bab sebelumnya telah membahas mengenai liabilitas lancar atau kewajiban lancar, maka bab ini akan membahas tentang ekuitas. Sebelum membahas mengenai ekuitas, mari kita lihat kembali persamaan akuntansi yang sudah dibahas pada bab dua sebelumnya.



Gambar 8.1 : Persamaan Akuntansi

Gambar diatas merupakan persamaan akuntansi yang sudah kita kenal. Persamaan ini menggambarkan hubungan antara sumber daya di bawah kendali perusahaan dan kewajiban saat ini kepada pemegang kepentingan. Aset menggambarkan sumber daya yang dimiliki dikendalikan oleh perusahaan; memiliki nilai ekonomis dan dapat digunakan dalam menjalankan perusahaan. Liabilitas, atau kewajiban

menggambarkan kewajiban perusahaan kepada pemegang kepentingan. Ekuitas atau modal menggambarkan bagian pemilik dari nilai perusahaan (Clarke *et al.*, 2015).

Ekuitas dapat dikatakan klaim kepemilikan atas total aset perusahaan (Weygandt *et al.*, 2018). Hal ini dikarenakan pemegang kepentingan seperti pemegang saham atau kreditur dapat mengajukan klaim terhadap aset perusahaan. Dengan mengurangi hutang kepada kreditur (yang merupakan kewajiban perusahaan) dari aset, maka dapat ditentukan apa yang menjadi milik pemegang saham. Ekuitas inilah yang mewakili sisa klaim pemegang saham atas aset. Singkatnya, ekuitas didapatkan dari total aset dikurangi total kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas juga dapat didefinisikan sebagai 'kepentingan sisa dalam aset entitas setelah' dikurangi semua kewajibannya" (Atrill *et al.*, 2020).

8.2 Saham

Umumnya, perusahaan akan menerbitkan sertifikat saham kepada pemegang saham sebagai bukti dokumentasi kepemilikan mereka. Sertifikat saham tersebut menunjukkan jumlah nominal yang ditetapkan untuk setiap lembar saham, yang disebut nilai nominal. Namun, saham juga dapat diterbitkan tanpa nilai nominal, yang disebut saham tanpa nilai nominal.

Saham menandakan kepemilikan pemegang saham atas perusahaan. Porsi kepemilikan saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Selain memiliki "hak" atas perusahaan, pemegang saham memiliki hak-hak seperti kemampuan untuk memberikan suara pada isu-isu yang mempengaruhi perusahaan. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak atas sebagian dari distribusi pendapatan perusahaan. Pemegang saham juga memiliki hak atas sebagian aset yang dilikuidasi jika perusahaan menlikuidasi asetnya.

Dalam teori, perusahaan menerbitkan saham dengan “kelas” yang berbeda. Walaupun dalam praktiknya, jarang ditemukan adanya saham lain selain saham biasa dan saham preferen. Saham preferen pun tidak terlalu umum dalam praktiknya. Berikut akan dibahas perbedaan saham biasa dan saham preferen.

8.2.1 Saham Biasa

Salah satu cara perusahaan, selain dengan mengajukan pendanaan melalui pinjaman atau menerbitkan piutang obligasi atau wesel, perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham biasa kepada calon investor. Modal saham biasa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli.

Saham biasa dikeluarkan oleh semua perusahaan. Pemegang saham biasa hanya menerima sebagian dari pendapatan perusahaan setelah semua klaim pihak ketiga lainnya telah dibayar. Sehingga pemegang saham biasa kerap kali disebut pengambil risiko utama. Walaupun pemegang saham biasa hanya bisa menerima sebagian dari pendapatan perusahaan setelah semua klaim lainnya oleh pihak ketiga lainnya telah dibayar, tidak ada batasan maksimal mengenai seberapa banyak yang bisa pemegang saham biasa dapatkan. Oleh karena itu, biasanya hanya pemegang saham biasa memiliki hak untuk memberikan suara pada hal-hal yang dapat mempengaruhi pengelolaan perusahaan, misalnya pengangkatan direksi perusahaan.

Nilai nominal saham ditentukan oleh orang-orang yang memulai perusahaan atau *founder* perusahaan. Contohnya, perusahaan Pisco memiliki ekuitas saham sebesar Rp 600.000.000. Jika perusahaan menerbitkan tiga lembar saham, maka masing-masing Rp 200.000.000. 1 juta lembar saham berarti tiap lembar saham bernilai 600 rupiah atau kombinasi lainnya yang menghasilkan total Rp 600.000.000.

Setiap lembar saham harus memiliki nilai nominal yang sama (Weygandt *et al.*, 2018).

8.2.2 Saham Preferen

Terkadang, beberapa perusahaan juga menerbitkan saham preferen selain menerbitkan saham biasa. Apa yang membedakan saham pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa? Perbedaannya, pemegang saham preferen memiliki hak untuk “didahulukan” dijamin dalam hal pembayaran dividen. Pemegang saham prefren memiliki hak untuk menerima dari setiap dividen yang dibayarkan, dengan jumlah tertentu. Biasanya, perusahaan menetapkan persentase dari nilai nominal saham preferen biasanya digunakan untuk menentukan batas atas hak saham prefren. Misalnya, jika perusahaan Pisco menerbitkan Rp 100.000.000 saham preferen saham dengan tingkat dividen 7%, maka pemegang saham preferen berhak atas Rp 7.000.000 pertama (atau 7% dari Rp 100.000.000) dari setiap dividen yang dibayarkan oleh perusahaan di tahun tersebut. Jika perusahaan mengumumkan dividen lebih dari Rp 7.000.000, maka sisanya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa.

8.2.3 Perubahan Nilai Nominal Saham

Perusahaan memiliki hak untuk menentukan nilai nominal atau nilai par saham. Nilai nominal saham ini juga tidak berlaku untuk selamanya. Perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk mengubahnya di lain waktu, dengan cara memecah saham (*stock split*) atau menggabungkan saham (*reverse stock*). Untuk lebih jelasnya mengenai perubahan nilai nominal ini, dapat dilihat pada contoh dibawah ini.

Misalkan, perusahaan Pisco telah menerbitkan dua juta saham biasa dengan nilai nominal per lembar sebesar Rp 3000,-. Pisco memutuskan untuk mengubah nilai nominal saham dari Rp 3000,- menjadi Rp 1500,-. Pisco kemudian

memutuskan untuk menerbitkan setiap pemegang saham dua kali lebih banyak saham, masing-masing setengah dari nilai nominal awal, untuk menjaga nilai nominal total saham tetap utuh. Sehingga, setiap pemegang saham akan tetap memiliki jumlah saham yang sama dengan nilai total nominal yang sama. Prosedur inilah yang dikenal sebagai *stock split*.

Selain pemecahan saham, saham juga dapat digabungkan, yang merupakan kebalikan dari pemecahan saham. Dengan digabungkan atau dikonsolidasi, perusahaan akan mempunyai lebih sedikit saham yang beredar, yang kemudian berakibat pada kenaikan nilai nominal per saham untuk menutupi perbedaan tersebut. Kedua metode diatas, baik *split stock* maupun *reverse stock* seharusnya tidak berdampak pada nilai total keseluruhan saham yang dimiliki. Hal ini dikarenakan setiap pemegang saham akan mempertahankan persentase kepemilikan yang sama atas perusahaan, baik setelah pemisahan maupun setelah penggabungan (McLaney & Atrill, 2020). Perubahan nilai nominal saham, baik memecah saham maupun mengkonsolidasikan saham, dilakukan perusahaan untuk menjaga harga saham agar tidak naik atau turun terlalu banyak.

Selain mengubah nilai nominal dengan cara *split stock* atau *reverse stock*, perusahaan juga dapat membeli sahamnya sendiri dari saham yang beredar. Transaksi ini disebut sebagai pembelian kembali saham. Saham yang terkena dampak biasanya akan dibatalkan oleh perusahaan. Tidak seperti dividen yang melibatkan seluruh pemegang saham, pembelian kembali saham seringkali hanya melibatkan sebagian kecil dari pemegang saham.

8.2.4 Menerbitkan Saham

Saldo normal akun saham berada pada sisi kredit. Ketika akun saham bertambah maka akan bertambah disisi kredit dan ketika berkurang maka akan dicatat disisi debit. Dalam mencatat jumlah setiap kelas saham yang berbeda, perusahaan menggunakan akun terpisah. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal Rp 1.500 dan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 250. Perusahaan menjual 40.000 lembar saham biasa dan 4.000 lembar saham preferen pada nilai nominal. Berikut ini adalah jurnal yang dibuat oleh perusahaan untuk mencatat transaksi terkait saham tersebut:

Kas	16.000.000
Saham Preferen (4000 lembar x Rp 1.500)	6.000.000
Saham Biasa (40.000 lembar x Rp 250)	10.000.000

Gambar 8.6 : Jurnal untuk Mencatat Penerbitan Saham

Namun pada praktiknya, saham yang diterbitkan oleh perusahaan dijual dengan harga yang berbeda dengan nilai nominalnya. Harga saham ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keuangan perusahaan, performa perusahaan, serta riwayat pembagian dividen perusahaan. Ekspektasi investor terhadap potensi perkembangan perusahaan yang terlihat dari potensi pendapatan perusahaan juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi harga saham perusahaan.

Saham yang dijual dengan harga lebih tinggi dari nominalnya, maka saham tersebut dikatakan dijual dengan harga premium. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Pisco menerbitkan 2.500 lembar saham preferen dengan nilai nominal saham Rp 500 secara tunai seharga Rp 550. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut:

Kas	1.375.000
Saham Preferen (2500 lembar x Rp 500)	1.250.000
Modal Disetor (2500 lembar x Rp 50)	125.000

Gambar 8.3 : Jurnal untuk Mencatat Pembelian Saham dengan Premium

Namun, jika saham dijual dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya, maka saham tersebut telah dijual dengan harga diskon. Contohnya, jika saham biasa dengan nilai nominal Rp 350 dijual seharga Rp 150 per saham, saham tersebut dijual dengan diskon Rp 200.

8.3 Laba Ditahan

Laba bersih yang “disimpan” oleh perusahaan disebut laba ditahan. Saldo normal akun laba ditahan berada di sisi kredit. Oleh karena itu, ketika saldo laba ditahan bertambah, maka akan dicatat di sisi kredit. Sedangkan ketika saldo laba ditahan berkurang, baik karena pembayaran dividen atau ketika perusahaan mencatat kerugian, maka akan dicatat di sisi debit. Laba ditahan terdiri oleh tiga komponen, yaitu pendapatan, beban, dan dividen (Weygandt *et al.*, 2015).

Pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut telah melakukan jual beli atas barang yang dihasilkannya (perusahaan manufaktur), menjual barang dagangannya (perusahaan dagang), atau ketika perusahaan telah memberikan jasa (perusahaan jasa) kepada pelanggan. Namun, tidak terbatas pada itu saja. Komisi, bunga, dividen juga merupakan sumber pendapatan lain yang khas bagi banyak perusahaan.

Jumlah nominal barang atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan disebut sebagai beban. Dalam perusahaan manufaktur, maka beban adalah segala hal yang

dikeluarkan untuk memproduksi barang. Begitu juga dalam perusahaan dagang, maka segala sesuatu yang dikeluarkan untuk menjual barang dianggap beban. Untuk perusahaan jasa, segala hal yang perlu dikeluarkan untuk memberikan jasa disebut beban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban merupakan pengurangan ekuitas yang disebabkan karena menjalankan usaha. Pengurangan ini dapat mengambil berbagai sebutan berbeda berdasarkan jenis aset atau layanan yang digunakan. Misalnya pada perusahaan manufaktur terdapat beban tenaga kerja langsung, beban overhead, beban utilitas, beban pengiriman, beban sewa, beban bunga, dan beban pajak.

Dividen merupakan sebagian dari laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan, yang sebelumnya telah mendapat persetujuan dari direksi untuk dibagikan kepada pemegang saham. Dividen adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemegang saham dalam bentuk uang atau aset lainnya. Namun dividen tidak termasuk dalam biaya. Sebelum memutuskan untuk membayarkan dividen, perusahaan akan menghitung pendapatan dan bebannya, untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki laba bersih atau rugi. Perusahaan kemudian memutuskan untuk membayar dividen pemiliknya jika perusahaan memiliki laba bersih dan memutuskan untuk membayarkan dividen. Dividen bukanlah sebuah keharusan bagi perusahaan, melainkan kebijakan perusahaan tersebut. Praktik ini berlaku bagi perusahaan pada umumnya, baik pada perusahaan manufaktur, maupun pada perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang.

8.4 Dividen

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Praktiknya, dividen tunai merupakan jenis pembagian yang paling sering terjadi. Saldo normal akun dividen berada di sisi debet. Oleh karena itu, ketika bertambah akun dividen akan dicatat di sisi sebelah debet, dan ketika berkurang akan dicatat di sisi sebelah kredit. Besaran dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham diputuskan oleh kebijakan perusahaan yang diambil oleh direksi perusahaan. Oleh karena itu, sering kali timbul pertanyaan mengenai ukuran dividen yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Namun, hingga saat ini tidak ada standar yang mengatur mengenai besaran dividen yang harus dibayarkan, sehingga kebijakan jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan masih merupakan kebijakan perusahaan. Bahkan perusahaan tidak wajib membayarkan dividen ke pemegang sahamnya walaupun pada tahun tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan atas hasil operasinya. Direksi akan memikirkan pertimbangan komersial, seperti sumber daya keuangan perusahaan, komitmen untuk masa depan, dan harapan pemegang saham sebelum memutuskan mengenai dividen, baik besaran maupun kebijakan pembayaran dividen. Sehingga, pertimbangan-pertimbangan diatas akan mempengaruhi keputusan untuk membayar dividen. Tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai kapan dan besaran dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Ketika direksi perusahaan memutuskan untuk mebayarkan dividen, maka pada saat menyiapkan laporan posisi keuangan, dividen harus dikurangkan dari laba ditahan. Hal ini dikarenakan pembayaran dividen ini dibayarkan dari laba ditahan. Praktiknya, investor sering diberikan dividen

tahunan, terkadang dalam dua kali angsuran. Dividen "final" dapat dibagikan segera setelah akhir tahun dan dividen "interim" selama pertengahan tahun.

Umumnya, dividen diumumkan oleh direksi perusahaan selama tahun berjalan namun belum dibayarkan pada akhir tahun, sehingga akhirnya muncul sebagai kewajiban. Hal ini berarti bahwa sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Perusahaan besar biasanya memiliki kebijakan pembayaran dividen yang pasti dan konsisten. Kebijakan atas dividen akan ditafsirkan oleh pemegang saham sebagai cerminan pandangan direksi untuk masa depan. Nominal dividen yang lebih tinggi ditafsirkan sebagai kepercayaan diri direksi bahwa prospek masa depan perusahaan yang dipimpinnya menjanjikan.

Bagaimana pencatatan transaksi terkait dividen? Misalnya, dewan direksi Pisco mengumumkan pembagian dividen ke peegang sahamnya. Dividen yang akan dibagikan sebesar Rpp 325.000.000 dengan pembagian Rp125.000.000 untuk pemegang saham preferen dan Rp 200.000.000 untuk pemegang saham biasa. Pada saat tanggal pengumuman dividen, perusahaan mencatat sebagai berikut:

Saldo Laba	325.000.000
Utang Dividen	325.000.000

Gambar 8.7 : Jurnal pada saat Pengumuman Dividen

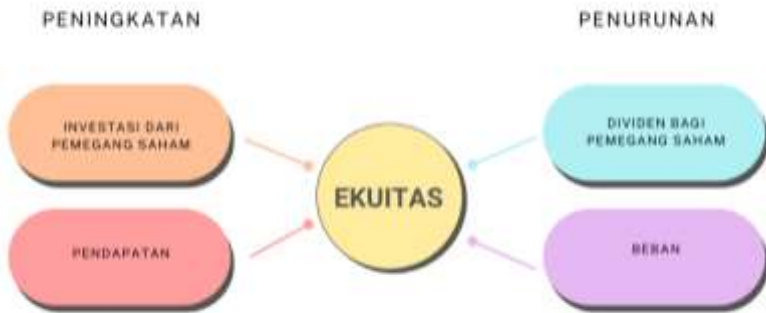
Pada saat pembayaran dividen, maka Pisco akan mencatat transaksi pembayaran dividen sebagai berikut:

Utang Dividen	325.000.000
Kas	325.000.000

Gambar 8.8 : Jurnal pada saat pembayaran Dividen

8.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan pembahas pada sub bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa jumlah ekuitas dapat naik atau turun. Hal ini dipengaruhi oleh transaksi yang berkaitan dengan modal perusahaan. Bagaimana transaksi yang terjadi di perusahaan mempengaruhi jumlah ekuitas sehingga terdapat kenaikan dan penurunan ekuitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 8.9 : Kenaikan dan Penurunan pada Ekuitas

Pada gambar diatas, terlihat hal apa saja yang mempengaruhi ekuitas, baik menambah ekuitas perusahaan maupun menurunkan ekuitas. Ketika perusahaan mendapatkan investasi dari pemegang saham, dan atau ketika perusahaan mendapatkan pendapatan, maka hal tersebut akan menambah ekuitas. Sedangkan ketika perusahaan membayarkan beban dan memutuskan untuk membagikan dividen bagi pemegang saham, maka mengurangi ekuitas perusahaan.

Perubahan ekuitas ini tentu saja harus dilaporkan di laporan keuangan. Dimanakah perusahaan melakukan laporan atas perubahan ekuitas? Perusahaan dapat melakukan perubahan ekuitasnya pada laporan perubahan ekuitas. Lalu, apa saja yang akan harus dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas berisi informasi tentang

modal saham, agio saham, selisih kurs (jika ada), cadangan umum, kerugian yang belum direalisasi, saldo laba, jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, serta kepentingan non pengendali. Komponen-komponen inilah yang akan membentuk jumlah ekuitas yang disajikan dalam laporan keuangan.

Untuk menghitung ekuitas, diawali dengan informasi mengenai modal saham awal. Kemudian, modal saham tersebut dijumlahkan dengan tambahan modal disetor serta komponen ekuitas lainnya dan saldo laba. Setelah itu dijumlahkan dengan jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas serta kepentingan non pengendali untuk mendapatkan jumlah ekuitas milik perusahaan.

Ekuitas	
Modal Saham	xxx
Tambahan Modal Disetor	xxx
Uang Muka Setoran Modal	xxx
Komponen Ekuitas Lainnya	xxx
Saldo Laba	xxx
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non Pengendali	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx

Gambar 8.10 : Perhitungan Ekuitas
(Sumber: Kartikahadi *et al.*, 2020)

DAFTAR PUSTAKA

- Atrill, P., McLaney, E., Harvey, D., & Cong, L. M. 2020. *Accounting: An Introduction* (8th Edition). Pearson.
- Clarke, E. A., Wilson, Y., & Wilson, M. 2015. *Accounting: an Introduction to Principles and Practices*. Cengage Learning.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. 2020. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS* (Edisi Ketiga, Vol. 1). Ikatan Akuntan Indonesia.
- McLaney, E., & Atrill, P. 2020. *Accounting and Finance. An Introduction* (Tenth Edition). Pearson.
www.pearson.com/uk
- Warren, C. S., Reeve, J. M., & Duchac, J. E. 2017. *Accounting* (29 Edition). Cengage Learning.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. 2018. *Financial Accounting with International Financial Reporting Standards* (Fourth Edition). Wiley.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. 2015. *Financial Accounting IFRS Edition* (3rd Edition). Wiley.

BAB 9

AKUNTANSI KOPERASI

Oleh Agnes Susana

9.1 Pengertian Koperasi

Menurut (Hadi, 2013) dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992, pasal 1 pengertian Koperasi adalah

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2012, menurut pasal 1 pengertian Koperasi adalah

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Menurut PSAK No.27 (Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, 1998) tentang Akuntansi Perkoperasian, pendapatan koperasi yang berasal dari anggota harus disajikan secara terpisah dengan pendapatan yang berasal dari non anggota. Beban usaha dan beban perkoperasian juga harus disajikan terpisah dalam laporan Perhitungan Hasil Usaha.

Menurut PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah

“Badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk

meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional."

Pemahaman pengertian koperasi secara umum adalah

"Suatu perkumpulan orang yang secara sukarela berjuang bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan badan usaha yang dikelola secara demokrasi."

Berdasarkan gagasan pokok pengertian koperasi, konsep-konsep yang termasuk dalam pengertian koperasi adalah:

1. Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang pribadi atau badan hukum koperasi yang memiliki yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Karena merupakan perrkumpulan, maka bentuk kerjasama yang dibangun dalam koperasi bersifat terbuka dan sukarela, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban sama.
3. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sedemikian rupa sehingga setiap anggota koperasi wajib dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan pengawasan koperasi.
4. Untuk mewujudkan tujuan koperasi dibentuk badan usaha yang dapat menjalankan usaha secara demokratis.
5. Akibat terbentuknya badan usaha koperasi, segala resiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung bersama dan dibagi secara adil.

9.2 Karakteristik Koperasi Indonesia

Menurut PSAK Nomor 27, Ciri utama yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (dual member identities), yaitu

anggota adalah pemilik jasa koperasi dan pengguna (pengguna menghadapi usahanya sendiri). Oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung berdasarkan setidaknya satu kepentingan ekonomi bersama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kemandirian untuk membantu dan bertanggung jawab atas diri sendiri, kebersamaan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Selain itu para anggota koperasi meyakini nilai-nilai etika seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
- c. Koperasi penciptaan, pembiayaan, pengawasan dan diawasi serta digunakan oleh para anggotanya sendiri.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the members' welfare*).
- e. Apabila daya tamping koperasi berlebih untuk anggotanya maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota non koperasi.

9.3 Prinsip-Prinsip Koperasi Di Indonesia

Menurut Undang-undang nomor 17 TAHUN 2012, koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- e. Koperasi organisasi kepada anggota, pengawas, manajemen dan karyawan, dan untuk menyediakan publik dengan informasi tentang identitas mereka, kegiatan dan kepentingan koperasi;

- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

9.4 Perbedaan Koperasi Dengan Perseroan Terbatas

Menurut Sudarwanto (2013), untuk mengerti secara lebih lanjut tentang koperasi di Indonesia, maka berikut dibawah ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara Koperasi dengan Perseroan Terbatas:

Uraian	Koperasi	Perseroan Terbatas
1. Tujuan	Peningkatan kesejahteraan para anggota	Peningkatan kesejahteraan pada Pemilik Usaha/Modal
2. Pemegang Kekuasaan	Rapat Anggota	Rapat Umum Pemegang Saham
3. Hak Preferensi atas Modal	Persamaan atas pembatasan modal	Adanya hak prioritas dalam kaitannya dengan kekuatan modal
4. Kultur Internal	Kegotongroyongan	Individu
5. Asas Ekonomi	Demokrasi Ekonomi	Kekuatan Modal/Capital
6. Sifat Hubungan Kepemilikan	Kesetiakawanan	Kepentingan bisnis murni
7. Hak atas ekuitas	Besar kecilnya Pembagian SHU yang	Besarnya dividen yang diterima tergantung

Uraian	Koperasi	Perseroan Terbatas
	diterima anggota tergantung dari kepemilikan anggota	jumlah kepemilikan saham
8. Ekuitas	Terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, ekuitas, cadangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi	Terdiri atas modal saham dan Laba yang ditahan (<i>retained Earnings</i>)

9.5 Perkiraan Dalam Akuntansi Koperasi

Berikut dibawah ini, macam-macam akun yang digunakan dalam menyusun Laporan Keuangan Koperasi, yaitu:

1. Aktiva Lancar	a. Kas b. Surat-surat berharga c. Piutang Anggota d. Piutang Non Anggota e. Piutang Penjualan Angsuran f. Cadangan Penghapusan Piutang g. Wesel Tagih h. Perlengkapan Kantor i. Pembayaran di muka j. Pajak Penjualan Masukan (PPN Masukan) k. Pendapatan yang akan diterima
2. Investasi Jangka Panjang	a. Investasi saham b. Obligasi c. Penanaman dana ke Perusahaan
3. Aktiva Tetap Berwujud	a. Tanah b. Gedung Kantor c. Peralatan Kantor

	d. Kedaraan e. Mesin
4. Aktiva Tetap Tidak Berwujud	a. Hak Paten b. Goodwill c. Merek Dagang d. Hak Lease
5. Aktiva Lain-lain	a. Beban Pendirian Koperasi b. Piutang yang Ditangguhkan c. Jaminan Kontrak Pembelian
6. Kewajiban Lancar	a. Utang Usaha b. Utang Biaya (Utang Gaji, Utang Bunga, dan Utang Sewa) c. Pajak Penjualan Keluaran (PPN Keluaran) d. Utang Wesel e. Penerimaan di Muka f. Dana Bagian Sisa Hasil Usaha g. Simpana Sukarela
7. Kewajiban Jangka Panjang	a. Utang Bank b. Utang kepada pihak Lembaga Non Bank
8. Ekuitas Koperasi	a. Simpanan Pokok b. Simpanan Wajib c. Modal Penyertaan d. Modal Sumbangan e. Cadangan f. Sisa Hasil Usaha (SHU)
9. Penghasilan/Pendapatan	a. Partisipasi Bruto b. Partisipasi Netto c. Partisipasi Jasa Provisi d. Pendapatan Denda e. Pendapatan Nin Anggota f. Pendapatan di luar Usaha Koperasi

10. Beban	a. Beban Operasional b. Beban Pokok c. Beban Perkoperasian d. Beban diluar usaha Koperasi e. Harga Pokok
-----------	--

9.6 Persamaan Akuntansi Koperasi

Tahap utama akuntansi koperasi yang diistimewakan adalah keseimbangan antara kuantitas aset dan kewajiban, sehingga diperlukan rumusan persamaan akuntansi Koperasi, sebagai berikut:

$$\mathbf{AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS}$$

Persamaan akuntansi ini merupakan ayat-ayat jurnal yang saling berpasangan di mana sisi debit terletak di sebelah kiri dan sisi Kredit terletak disebelah Kanan. Cara ini menunjukkan adanya hubungan dari setiap perkiraan yang mempertahankan persamaan akuntansi dasarnya.

Dalam setiap transaksi yang terjadi dalam Koperasi maka jumlah nominal pada Debit dan jumlah nominal pada Kredit harus sama (*balance*), sehingga dapat mempertahankan keseimbangan persamaan akuntansi kopersinya.

Aktiva		=	Kewajiban		+	Ekuitas Pemilik	
Debit	Kredit		Debit	Kredit		Debit	Kredit
<i>Bertambah</i>	<i>Berkurang</i>		<i>Berkurang</i>	<i>Bertambah</i>		<i>Berkurang</i>	<i>Bertambah</i>
(+)	(-)		(-)	(+)		(-)	(+)

Gambar 9.1 : Hubungan Persamaan Akuntansi dengan Debit dan Kredit

Contoh Transaksi dan Penyelesaian Persamaan Akuntansi Koperasi:

Transaksi 1

Pada tanggal 1 Januari 2019, 100 orang anggota Koperasi Setia Abadi menyerahkan uang sebagai simpanan pokok masing-masing sebesar Rp 300.000,-

Transaksi ini menyebabkan Aktiva berupa kas bertambah dan ekuitas Simpanan Pokok bertambah sebesar Rp 30.000.000,-

Persamaan Akuntansinya:

Aktiva		=	Kewajiban + Ekuitas	
Kas			Simpanan Pokok	
30.000.000			30.000.000	

Transaksi 2

Pada tanggal 5 Januari 2019 membeli peralatan kantor:

Meja dan kursi	Rp 1.500.000,-
Almari arsip	Rp 800.000,-
Komputer 1 unit	<u>Rp 2.500.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp 4.800.000.-

Dari jumlah tersebut Rp 2.000.000,- dibayar secara tunai dan sisanya secara kredit.

Atas transaksi ini aktiva berupa perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp 4.800.000,- dan Kas berkurang sebesar Rp 2.000.000,-; sedangkan kewajiban berupa utang usaha bertambah sebesar Rp 2.800.000,-

Persamaan Akuntansi:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Kas	Peralatan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok
30.000.000			30.000.000
(2.000.000)	4.800.000	2.800.000	
28.000.000	4.800.000	2.800.000	30.000.000

Transaksi 3

Tanggal 9 Januari 2019, diterima dari anggota koperasi uang sejumlah Rp 5.000.000,- sebagai simpanan wajib.

Transaksi ini berupa Kas Bertambah sebesar Rp 5.000.000,- dan Simpanan Wajib bertambah sebesar Rp 5.000.000,-

Persamaan Akuntansi:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Kas	Peralatan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib
30.000.000			30.000.000	
(2.000.000)	4.800.000	2.800.000		
28.000.000	4.800.000	2.800.000	30.000.000	
5.000.000				5.000.000
33.000.000	4.800.000	2.800.000	30.000.000	5.000.000

Transaksi 4

Tanggal 18 Januari 2019, pembelian perlengkapan secara tunai sebesar Rp 1.000.000,-

Transaksi ini perlengkapan kantor bertambah sebesar Rp 1.000.000,- dan Kas berkurang sebesar Rp 1.000.000,-

Persamaan Akuntansi:

Aktiva **= Kewajiban + Ekuitas**

Kas	Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib
30.000.000				30.000.000	
(2.000.000)	4.800.000		2.800.000		
28.000.000	4.800.000		2.800.000	30.000.000	
5.000.000					5.000.000
33.000.000	4.800.000		2.800.000	30.000.000	5.000.000
(1.000.000)		1.000.000			
32.000.000	4.800.000	1.000.000	2.800.000	30.000.000	5.000.000

Transaksi 5

Pada tanggal 25 Januari 2019, dibeli barang dagangan sebesar Rp 22.000.000,- dengan rincian pembayaran tunai sebesar Rp 12.000.000,- dan pembayaran kredit sebesar Rp 10.000.000,-

Transaksi ini menyebabkan kas berkurang sebesar Rp 12.000.000,-, persediaan barang dagang bertambah sebesar Rp 22.000.000,- dan kewajiban berupa utang usaha bertambah sebesar Rp 10.000.000,-

Persamaan Akuntansi:

Aktiva

= Kewajiban + Ekuitas

Kas	Persediaan n Barang Dagang	Peralata n Kantor	Perleng kapan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpana n Wajib
30.000.000					30.000.000	
(2.000.000)		4.800.00 0		2.800.000		
28.000.000		4.800.00 0		2.800.000	30.000.000	
5.000.000						5.000.000
33.000.000		4.800.00 0		2.800.000	30.000.000	5.000.000
(1.000.000)			1.000.000			
32.000.000		4.800.00 0	1.000.000	2.800.000	30.000.000	5.000.000
(12.000.00 0)	22.000.00 0			10.000.00 0		
20.000.000	22.000.00 0	4.800.00 0	1.000.000	12.800.00 0	30.000.000	5.000.000

Transaksi 6

Pada tanggal 28 Januari 2019, Barang dagangan dengan harga pokok Rp 9.000.000,- dijual sebesar Rp 15.500.000,-, dimana Rp 10.000.000,- diterima dan sisanya dibayarkan bulan Pebruari 2019

Transaksi ini menyebabkan kas bertambah sebesar Rp 10.000.000,-, piutang usaha bertambah sebesar Rp 5.500.000,-; persediaan barang dagang berkurang sebesar Rp9.000.000,- dan ekuitas berupa Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 6.500.000,-

Persamaan Akuntansi:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Kas	Piutang Usaha	Persediaan Barang Dagang	Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	SHU
30.000.000						30.000.000		
(2.000.000)			4.800.000		2.800.000			
28.000.000			4.800.000		2.800.000	30.000.000		
5.000.000							5.000.000	
33.000.000			4.800.000		2.800.000	30.000.000	5.000.000	
(1.000.000)				1.000.000				
32.000.000			4.800.000	1.000.000	2.800.000	30.000.000	5.000.000	
(12.000.000)		22.000.000			10.000.000			
20.000.000		22.000.000	4.800.000	1.000.000	12.800.000	30.000.000	5.000.000	
10.000.000	5.500.000	(9.000.000)						6.500.000
30.000.000	5.500.000	13.000.000	4.800.000	1.000.000	12.800.000	30.000.000	5.000.000	6.500.000

Transaksi 7

Pada tanggal 30 Januari 2019, Dibayarkan utang usaha sebesar Rp 12.800.000,-

Transaksi ini menyebabkan kas berkurang sebesar Rp 12.800.000,-, kewajiban berupa utang usaha berkurang sebesar Rp 12.800.000,-

Persamaan Akuntansi:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Kas	Piutang Usaha	Persediaan Barang Dagang	Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	SHU
30.000.000						30.000.000		
(2.000.000)			4.800.000		2.800.000			
28.000.000			4.800.000		2.800.000	30.000.000		
5.000.000							5.000.000	
33.000.000			4.800.000		2.800.000	30.000.000	5.000.000	
(1.000.000)				1.000.000				
32.000.000			4.800.000	1.000.000	2.800.000	30.000.000	5.000.000	
(12.000.000)		22.000.000			10.000.000			
20.000.000		22.000.000	4.800.000	1.000.000	12.800.000	30.000.000	5.000.000	
10.000.000	5.500.000	(9.000.000)						6.500.000
30.000.000	5.500.000	13.000.000	4.800.000	1.000.000	12.800.000	30.000.000	5.000.000	6.500.000
(12.800.000)					(12.800.000)			
17.200.000	5.500.000	13.000.000	4.800.000	1.000.000	0	30.000.000	5.000.000	6.500.000

Transaksi 8

Pada tanggal 31 Januari 2019, Dibayarkan gaji karyawan sebesar Rp 5.000.000,- Transaksi ini menyebabkan kas berkurang sebesar Rp 5.000.000,-, SHU bertambah sebesar Rp 5.000.000,- karena pembayaran gaji Karyawan.

Persamaan Akuntansi:

Aktiva = Kewajiban + Ekuitas

Kas	Piutang Usaha	Persediaan Barang Dagang	Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	SHU
30.000.000						30.000.000		
(2.000.000)			4.800.000		2.800.000			
28.000.000			4.800.000		2.800.000	30.000.000		
5.000.000							5.000.000	
33.000.000			4.800.000		2.800.000	30.000.000	5.000.000	
(1.000.000)				1.000.000				
32.000.000			4.800.000	1.000.000	2.800.000	30.000.000	5.000.000	
(12.000.000)		22.000.000			10.000.000			
20.000.000		22.000.000	4.800.000	1.000.000	12.800.000	30.000.000	5.000.000	
10.000.000	5.500.000	(9.000.000)						6.500.000
30.000.000	5.500.000	13.000.000	4.800.000	1.000.000	12.800.000	30.000.000	5.000.000	6.500.000
(12.800.000)					(12.800.000)			

Kas	Piutang Usaha	Persediaan Barang Dagang	Peralatan Kantor	Perlengkapan Kantor	Utang Usaha	Simpanan Pokok	Simpanan Wajib	SHU
17.200.000	5.500.000	13.000.000	4.800.000	1.000.000	0	30.000.000	5.000.000	6.500.000
(5.000.000)								(5.000.000)
12.200.000	5.500.000	13.000.000	4.800.000	1.000.000	0	30.000.000	5.000.000	1.500.000

Berdasarkan transaksi 1 sampai dengan 8, maka dapat disusun Neraca Koperasi Setia Abadi per 31 Januari 2019 sebagai berikut:

KOPERASI SETIA ABADI
NERACA
Per 31 Januari 2019

AKTIVA		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kas	Rp 12.200.000	Utang Usaha	Rp -
Piutang Usaha	5.500.000		
Persediaan barang dagang	13.000.000	Ekuitas:	
Perlengkapan kantor	1.000.000	Simpanan Pokok	Rp 30.000.000
Peralatan kantor	4.800.000	Simpanan Wajib	5.000.000
		Sisa Hasil Usaha	1.500.000
Total Aktiva	Rp 36.500.000	Total Kewajiban dan Ekuitas	Rp 36.500.000

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants. 1998. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Akuntansi Perkoperasian*. 27, 1–21.
- Hadi, M. D. 2013. Analisis Rasio Keuangan Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Sisa Hasil Usaha (SHU) KPRI Dewantara. *Skripsi Universitas Jember*.
- Sudarwanto, Adenk, 2013, Akuntansi Koperasi, Yogyakarta: Graha Ilmu

BIODATA PENULIS



I Nyoman Wahyu Widiana, S.E., M.Si.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
dan Universitas Mahendradatta

I Nyoman Wahyu Widiana, pria kelahiran Sanur, 25 April 1994. Anak bungsu dari tiga bersaudara ini menamatkan S1 Ekonomi Pembangunan tahun 2015 dan S2 Ilmu Ekonomi tahun 2018 di Universitas Udayana, dengan predikat Cumlaude Lulusan Terbaik. Penulis kini tengah menyelesaikan S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana. Penulis adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dan Universitas Mahendradatta. Penulis menyukai kesenian dan kebudayaan sejak remaja ini mengantarkannya mengikuti pertukaran pelajar dan kebudayaan mewakili Indonesia pada ajang Asia Student Summit di Seoul, Korea Selatan pada tahun 2018. Jabatan terakhir penulis adalah Kepala Prodi S1 Manajemen Universitas Mahendradatta tahun 2022 dan Ketua BUMN CSR Provinsi Bali 2020. Penulis aktif sebagai pembicara pada setiap kegiatan, termasuk Pembicara Nasional Literasi Digital Keminfo 2021. Penulis berkomitmen dapat berkontribusi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Besar

harapan penulis untuk dapat memajukan generasi emas penerus bangsa melalui tulisannya.

BIODATA PENULIS



Cici Widya Prasetyandari, S. E., M.M

Dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Penulis lahir di Banyuwangi pada tanggal 18 April 1993. Penulis merupakan Dosen Tetap di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan di Universitas Jember pada tahun 2019.

BIODATA PENULIS



Yenni Rohmatun, S.E, Sy. M.M.

Dosen Program Studi Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi Syariah

Lahir di Cirebon pada tanggal 07 Agustus 1990. Telah menyelesaikan Program Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah konsentrasi pada Akuntansi Syariah di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Bobos Cirebon tahun 2013. Serta menyelesaikan studi Pascasarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Cirebon dengan mengambil jurusan Magister Manajemen tahun 2019.

Mulai berkarir di dunia Perguruan Tinggi di tahun 2020 penulis memanfaatkan ilmu terapan menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Cirebon, dan sampai sekarang penulis menjadi Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-ishlah Cirebon. Dan penulis aktif menulis buku kolaborasi di Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi serta menulis karya ilmiah di bidang kepakarannya. Email : yennirohmatun@gmail.com

BIODATA PENULIS



Aliah Pratiwi, S.E., M. Ak.

Dosen Program Studi Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima

Penulis lahir di Bima pada tanggal 5 Juli 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima Program Studi Manajemen. Menyelesaikan S1 pada jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada jurusan Akuntansi. Saat ini penulis sedang aktif mengajar dan melakukan beberapa penelitian. Penulis adalah pengampu pada mata kuliah Pengantar Akuntansi, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Akuntansi Biaya dan lain-lain. Ini adalah buku kedua penulis setelah sebelumnya sudah menyelesaikan penulisan buku Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

BIODATA PENULIS



Zainal Potton, S.Ak

Mahasiswa Pascasarjana Keuangan Syariah
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Penulis Lahir di Liba pada 02 Oktober 1995. Penulis adalah salah satu mahasiswa pascasarjana keuangan syariah institute teeknologi dan bisnis ahmad dahlan Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di universitas muhammdiyah parepare pada tahun 2018. Melanjutkan pendidikan S2 di institute teknonlogi dan bisnis ahmad dahlan Jakarta pada tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Anna Sofia Atichasari, SE.,M.Si.,CMA

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi&Bisnis
Universitas Islam Syekh-Yusuf

Penulis lahir di Solo, 15 Oktober 1980. Penulis menekuni bidang akuntansi sejak tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 ilmu akuntansi di Trisakti Dan memulai karir mengajar sebagai Asisten Dosen serta dipercaya sebagai koordinator Praktikum. Mulai berkarier sebagai dosen sekaligus kaprodi akuntansi pada perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Bung Karno sejak tahun 2006. Dan 2017 diamanahkan kaprodi akuntansi dan 2021 sebagai wakil dekan bidang akademik pada Universitas Islam Syekh-Yusuf. Beberapa buku sudah di luncurkan terutama bidang Akuntansi keuangan, akuntansi syariah dan akuntansi manajemen. Penelitian bidang akuntansi juga dilakukan secara publikasi maupun yang tidak terpublikasi. asatichasari@unis.ac.id

BIODATA PENULIS

Ricky, S.E., M.Ak.

Dosen Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma
Pontianak

Penulis lahir di Pontianak tanggal 16 November 1992. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Dharma Pontianak. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.

BIODATA PENULIS



Rini Ridhawati, S.E., M.S.A., Ak.,

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram.

Penulis lahir di Palu tanggal 9 Oktober 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Akuntansi.